

**ANALISIS *VALUE FOR MONEY* ANGGARAN PENDAPATAN PADA
PEMERINTAH KOTA MEDAN**

SKRIPSI

Oleh :

Debby Tamara Enre

NIM 0502162082

Program Studi
AKUNTANSI SYARIAH



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA

MEDAN

2020 M/1441 H

**ANALISIS *VALUE FOR MONEY* ANGGARAN PENDAPATAN PADA
PEMERINTAH KOTA MEDAN (PERIODE 2014-2018)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Pada Program Studi Akuntansi Syariah

Oleh :

Debby Tamara Enre

NIM 0502162082

Program Studi

AKUNTANSI SYARIAH



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2020 M/1441 H

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Debby Tamara Enre**
Nim : 0502162082
Tempat/Tgl.Lahir : P. Siantar, 01 Januari 1999
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jalan Bajak I Perumahan Suka Cipta Residence No 07 Medan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul "**Analisis Value for Money Anggaran Pendapatan Pada Pemerintah Kota Medan**" benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 7 May 2020

Yang membuat pernyataan



Debby Tamara Enre

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul :

**ANALISIS VALUE FOR MONEY ANGGARAN PENDAPATAN PADA
PEMERINTAH KOTA MEDAN
(PERIODE 2014-2018)**

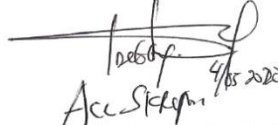
Oleh :

Debby Tamara Enre
NIM. 0502162082

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun)
Pada Program Studi Akuntansi Syariah

Medan, 04 Mei 2020

Pembimbing I



Acc Skripsi
4/05 2020

Hendra Harmain, SE, M.Pd
NIDN. 2010057302

Pembimbing II

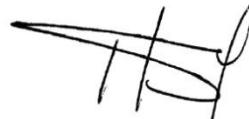


05 Mei 2020

Aqwa Naser Daulay, M.Si
NIDN. 2024128801

Mengetahui

Ketua Jurusan Akuntansi Syariah



Hendra Harmain, SE, M.Pd
NIDN. 2010057302

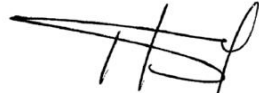
PENGESAHAN

Skripsi berjudul “ANALISIS *VALUE FOR MONEY* ANGGARAN PENDAPATAN PADA PEMERINTAH KOTA MEDAN (PERIODE 2014-2018)” an. Debby Tamara Enre, NIM 0502162082 Program Studi Akuntansi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINSU pada tanggal 03 Juni 2020. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun) pada Program Studi Akuntansi Syariah.

Medan, 23 Juni 2020

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Program Studi Akuntansi Syariah UIN-SU

Ketua,



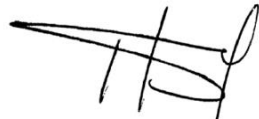
Hendra Harmain, M.Pd
NIDN. 2010057302

Sekretaris,



Kusmilwaty, SE, M.Ak
NIDN. 2014068001

Anggota



1. Hendra Harmain, M.Pd
NIDN. 2010057302



2. Aqwa Naser Dahlay, Msi
NIDN. 2024128801

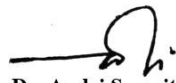


3. Ahmad Amin Dalimunthe, Ph.D
NIDN. 2012078402



4. Rahmat Daim Harahap, M.Ak
NIDN. 0126099001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN-SU Medan



Dr. Andri Soemitra, MA
NIDN. 2007057602

ABSTRAK

DEBBY TAMARA ENRE, NIM. 0502162082 (2020), **Analisis *Value for Money* Anggaran Pendapatan pada Pemerintah Kota Medan (Periode 2014-2018)**. Dibawah bimbingan Pembimbing Skripsi I **Bapak Hendra Harmain, M.Pd** dan Pembimbing Skripsi II **Bapak Aqwa Naser Daulay, M.Si**.

Permasalahan yang sering timbul dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah adanya pemborosan penggunaan anggaran yang dilakukan dan tidak tepat sasaran yang seharusnya dapat dirasakan oleh masyarakat umum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Kota Medan yang diukur dengan menggunakan metode *Value for Money* yang terdiri atas ekonomis, efisiensi, dan efektivitas, dan untuk mengetahui apakah kinerja keuangan yang dihitung dengan metode *Value for Money* sesuai dengan Kepmendagri No. 600.900-327 Tahun 1996. Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan. Pendekatan penelitian ini berupa pendekatan deskriptif yakni penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menyajikan data yang diterima dari Pemerintah Kota Medan berupa data-data jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Medan sehingga memberikan gambaran yang cukup jelas untuk penulis menganalisis serta membandingkan dengan teori yang ada. Teknik analisa data yang digunakan berupa teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, kinerja Pemerintah Daerah kabupaten Kota Medan selama tahun 2014-2018 belum ekonomis karena memiliki rata-rata rasio ekonomis yaitu 79% dan termasuk dalam kategori kurang ekonomis. Dari segi efisiensi kurang efisien karena memiliki rata-rata rasio efisiensi yaitu 99,71% . Dan dari segi efektivitas, rata-rata rasio efektivitas sebesar 82,49% yang mana berada dalam kategori cukup efektif. Rasio ekonomis Pemerintah Kota medan mengalami penurunan, rasio efisiensi belanja daerah mengalami peningkatan, rasio efektivitas pendapatan daerah mengalami penurunan, dan kinerja Pemerintah Kota Medan yang diukur dengan menggunakan *Value for Money* mengalami penurunan. Hal ini terjadi dikarenakan kurang maksimalnya pendapatan daerah, terbukti dengan pendapatan daerah yang tidak mampu mencapai target, dan meningkatnya belanja daerah Pemerintah Kota Medan. Maka dapat dikatakan bahwa Rasio *Value for Money* pada Pemerintah Kota Medan belum memenuhi standar berdasarkan Kepmendagri No. 600.900-327 Tahun 1996. Faktor penyebab *Value for Money* belum memenuhi standar dikarenakan besarnya realisasi atas belanja daerah yang dikeluarkan, dan juga pemerintah daerah tidak mampu dalam mencapai target pendapatan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah tersebut.

Kata Kunci : *Value for Money, Anggaran Pendapatan.*

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya. Serta shalawat beriringkan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Value for Money Anggaran Pendapatan Pada Pemerintah Kota Medan (Periode 2014-2018)”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Syariah di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak pihak yang memberi bantuan, motivasi serta do'a kepada penulis, maka dari itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada banyak pihak. Yaitu:

1. Yang paling spesial untuk kedua Orang Tua penulis, yaitu Ambo Enre Sahabuddin, SE, M.Si dan Yenni Sari, S.Pd, M.Si. Penulis mengucapkan banyak terima kasih atas pengorbanan dalam mendidik dan membesarkan, memberikan doa, cinta, kasih sayang, nasihat dan semangat serta dukungan yang tak bisa ternilai harganya demi kelancaran dan keberhasilan penulis dalam berbagai hal terkhusus untuk penyelesaian skripsi ini.
2. Kepada Ricky Irfan Enre adik sematawayang penulis yang telah memberikan motivasi, dukungan serta doa. Beserta seluruh keluarga besar yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah bersedia mendoakan dan membantu penulis.
3. Bapak Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Andri Seomitra, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

5. Bapak Hendra Harmain, SE, M.Pd selaku Ketua Jurusan Akuntansi Syariah dan Ibu Kusmilawaty, Ak, M.Ak selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Syariah.
6. Bapak Hendra Harmain, M.Pd selaku Pembimbing Skripsi I dan Bapak Aqwa Naser Daulay, M.Si selaku Pembimbing Skripsi II ditengah-tengah kesibukannya telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, dan selalu mampu memberikan motivasi bagi penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
7. Bapak Hendra Harmain, M.Pd selaku Penasehat Akademik yang telah membimbing penulis dan memberikan nasihat.
8. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmu yang luar biasa serta membantu penulis dalam kegiatan perkuliahan.
9. Seluruh Anggota/Staff BPKAD khususnya di Bidang Anggaran yang telah meluangkan waktu kepada peneliti ditengah kesibukannya.
10. Teman-teman seperjuangan AKC C (Akuntansi Syari'ah C) 2016 yang telah berjuang bersama-sama peneliti selama masa perkuliahan, dan juga keluarga KKN 109 yang telah memberi motivasi dan nasehat kepada penulis.
11. Kepada Layyinatus Shifah teman saya yang sama-sama berjuang dalam segala hal, yang telah banyak memberikan bantuan, menemani, dan menghibur penulis.
12. Untuk Super Junior terutama Cho Kyuhyun yang selalu menemani penulis dengan lagu-lagu serta suara indah nya selama mengerjakan Skripsi ini.

Akhirnya atas bantuan, bimbingan dan pengarahan serta dorongan yang diberikan semoga amal baik mereka diterima dan mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, dan penulis mengharapkan kritik serta saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan isi skripsi ini.

Demikianlah skripsi ini disusun dan semoga apa yang penulis sajikan dapat berguna dan bermanfaat bagi para pembaca untuk menambah bekal ilmu pengetahuan dan wawasan, Aamiin ya Rabbal'Alaamiin.

Medan, Mei 2020

Penulis

Debby Tamara Enre
NIM. 0502162082

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN.....	i
PENGESAHAN.....	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR GRAFIK.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
E. Batasan Istilah.....	9

BAB II KAJIAN TEORITIS

A. Landasan Teori	11
1. Keuangan Daerah.....	11
a. Pengertian Keuangan Daerah	11
b. Manajemen Keuangan Daerah.....	12
c. Sumber Pendapatan Daerah	13
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.....	16
a. Anggaran.....	16
b. Anggaran Pendapatan Daerah.....	16
c. Anggaran Belanja Daerah.....	17
d. Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	18

e. Karakteristik Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	19
f. Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	20
3. Kinerja Keuangan Daerah.....	20
a. Pengertian Kinerja Keuangan Daerah dan Indikator Kinerja Keuangan Daerah	20
4. Value for Money	25
a. Pengertian Value for Money dan Indikator Value for Money.....	25
b. Tujuan Value for Money	27
c. Manfaat Implementasi Value for Money.....	27
d. Langkah-Langkah Pengakuan Value for Money	28
5. Konsep Islam Mengenai Pengelolaan dan Kinerja Keuangan Daerah.....	31
B. Penelitian Terdahulu.....	36
C. Kerangka Berpikir	39

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian.....	44
B. Tempat dan Waktu Penelitian	45
C. Subjek dan Objek	45
D. Jenis dan Sumber Data	46
E. Teknik Pengumpulan Data	47
F. Teknik Analisis Data	47

BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Data Umum	51
1. Gambaran Umum Pemerintah Kota Medan	51

2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan	55
B. Data Khusus.....	64
C. Analisis Data dan Pembahasan.....	69
1. Rasio Ekonomis.....	69
2. Rasio Efisiensi	72
3. Rasio Efektivitas.....	75
4. Hasil Wawancara.....	79
5. Pembahasan	84
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	92
B. Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel		Hal
Tabel 1.1	Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Medan Tahun 2014-2018	6
Tabel 2.1	Klasifikasi Pengukuran Ekonomis	29
Tabel 2.2	Klasifikasi Pengukuran Efisiensi	30
Tabel 2.3	Klasifikasi Pengukuran Efektivitas	31
Tabel 3.1	Data Subjek Penelitian	45
Tabel 3.2	Klasifikasi Pengukuran Ekonomi	48
Tabel 3.3	Klasifikasi Pengukuran Efisiensi	49
Tabel 3.4	Klasifikasi Pengukuran Efektivitas	49
Tabel 4.1	Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Medan Tahun 2014	64
Tabel 4.2	Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Medan Tahun 2015	65
Tabel 4.3	Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Medan Tahun 2016	66
Tabel 4.4	Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Medan Tahun 2017	67
Tabel 4.5	Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Medan Tahun 2018	68
Tabel 4.6	Rasio Ekonomis Pemerintah Kota Medan	70
Tabel 4.7	Rasio Efisiensi Pemerintah Kota Medan	73
Tabel 4.8	Rasio Efektivitas Pemerintah Kota Medan	76
Tabel 4.9	Pengukuran Tingkat Ekonomis, Efisiensi, Efektifitas	84

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Hal
Gambar 2.1	Skema <i>Value for Money</i>	27
Gambar 2.2	Kerangka Berpikir	42
Gambar 4.1	Lambang Kota Medan	53
Gambar 4.2	Bagan Organisasi BPKAD Kota Medan	63

DAFTAR GRAFIK

Grafik	Hal
Grafik 4.1 Perkembangan Rasio Ekonomis Kota Medan	71
Grafik 4.2 Perkembangan Rasio Efisiensi Kota Medan	74
Grafik 4.3 Perkembangan Rasio Efektivitas Kota Medan	78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah daerah merupakan lembaga yang mengatur segala kegiatan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat disuatu daerah. Pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi yang luas kepada suatu daerah ditujukan untuk mempercepat terwujudnya peningkatan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistewaan dan potensi yang ada disuatu daerah.

Kemampuan pemerintah daerah khususnya Pemerintah Kota Medan dalam mengelola keuangan termuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas pembangunan. Dalam menjalankan otonomi daerah, pemerintah dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan yang efektif dan efisien mampu mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan, serta meningkatkan pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki masing-masing daerah.

Tuntutan yang tinggi pada kebutuhan pengukuran kinerja pemerintah mempunyai banyak tujuan. Tujuan tersebut paling tidak untuk meningkatkan kinerja dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah. Untuk itu, pemerintah daerah dituntut untuk mampu membangun ukuran kinerja yang baik. Ukuran kinerja yang disusun tidak dapat hanya dengan menggunakan satu ukuran. Oleh karena itu perlu ukuran yang berbeda untuk tujuan yang berbeda.¹

¹Muhammad Mahsun, *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*, (Yogyakarta: BPFE, 2006), h. 299.

Keberhasilan otonomi daerah tidak lepas dari kinerja pemerintah dalam mengelola keuangan daerahnya. Ukuran kinerja pemerintah berdasarkan anggaran berbasis kinerja dapat diukur dengan menggunakan konsep *Value for Money*.² Tuntutan akan kualitas dan profesionalisme sektor publik dapat dinilai dengan menggunakan konsep *Value for Money* (Nilai daripada Uang) dalam menjalankan aktivitasnya. *Value for Money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu: ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.³ Ekonomi diukur melalui rasio antara masukan aktual dengan masukan rencana. Efisiensi diukur melalui rasio efisiensi yang direncanakan. Efektivitas diukur dengan membandingkan keluaran realisasi (aktual) dengan keluaran menurut rencana.⁴ Dengan demikian, suatu daerah yang kinerja keuangannya dinyatakan baik berarti daerah tersebut memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah.⁵

Untuk dapat mengukur tingkat ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, organisasi pemerintahan harus dapat mengetahui tingkat input, output, dan outcome. Input adalah semua jenis sumber daya masukan yang digunakan dalam suatu proses tertentu untuk menghasilkan output. Indikator kinerja input mengukur jumlah sumber daya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan. Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat dianalisis apakah alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Contoh dari indikator kinerja input adalah dana yang dibutuhkan, tenaga yg terlibat, peralatan yg digunakan, jumlah bahan yg digunakan.

²Indra Bastian, *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Erlangga, 2006), h. 335.

³Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. (Yogyakarta: Andi, 2002), h. 27.

⁴Ibid, h. 27.

⁵Deddi Nordiawan, *Akuntansi Pemerintahan*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), h. 164.

Output adalah hasil langsung dari suatu proses. Pengukuran output adalah pengukuran keluaran yang dihasilkan dari proses. Ukuran output menunjukkan hasil implementasi program atau aktivitas. Dengan membandingkan keluaran dapat dianalisis apakah kegiatan yang terlaksana sesuai dengan rencana. Indikator output (keluaran) dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila tolak ukur dikaitkan dengan sasaran kegiatan yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Oleh karena itu indikator ini harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi. Contoh dari indikator kinerja output adalah jumlah pendapatan asli daerah yang berhasil diperoleh oleh bagian pendapatan.⁶

Outcome adalah dampak suatu program atau kegiatan terhadap masyarakat. Outcome lebih tinggi nilainya dari pada output, karena output hanya mengukur hasil tanpa mengukur dampaknya terhadap masyarakat, sedangkan outcome mengukur kualitas output dan dampak yang dihasilkan. Dengan kata lain, outcome adalah hasil yang dicapai dari suatu program atau kegiatan dibandingkan dengan hasil yang diharapkan. Contohnya, misalnya pemerintah mengeluarkan sejumlah dana untuk kegiatan pencegahan penyakit malaria. Input primernya adalah jumlah dana yang dikeluarkan, sedangkan input sekundernya bisa berupa pembelian obat-obatan, vaksinasi, tenaga medis, dan peralatan medis. Outputnya adalah bisa orang yang diberi vaksinasi atau wilayah tertentu yang dijadikan sasaran pencegahan penyebaran malaria. Outcomenya adalah wilayah tertentu terhindar dari wabah penyakit malaria, atau penyakit malaria dapat dicegah penyebarannya dari wilayah tertentu.

Value for Money dalam konteks ekonomi daerah merupakan jembatan untuk menghantarkan pemerintah daerah mencapai sistem pemerintahan yang baik. Untuk mendukung dilakukannya pengelolaan dana publik yang mendasarkan konsep *value for money*, maka diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah yang baik. Dalam mengukur *value for money*, indikator yang digunakan yaitu

⁶Mahmudi, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, (Yogyakarta :UPP STIM YPKN, 2007), h. 197.

diambil dari nilai anggaran dan realisasi belanja daerah, dan anggaran dan realisasi pendapatan asli daerah.

Kota Medan memiliki banyak potensi yang dapat digali untuk dapat dijadikan sumber pendapatan dari berbagai sektor. Perekonomian Kota Medan digerakkan oleh sektor perdagangan/hotel/restoran, telekomunikasi dan transportasi, dan industri pengelolaan yang dapat meningkatkan PAD. Dan salah satu pendapatan terbesar Kota Medan adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Jika kinerja keuangan Pemerintah Daerah sudah memenuhi kriteria ekonomi, efisiensi, dana efektif maka dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

Tetapi permasalahan yang sering timbul dalam pelaksanaan APBD adalah adanya pemborosan penggunaan anggaran belanja yang dibelanjakan dan tentu saja tidak tepat sasaran yang seharusnya dapat dirasakan oleh masyarakat umum. Sebagai contoh, proyek pembangunan tanpa manfaat yang dilakukan pemerintah kota Medan yaitu Proyek Sky Bridge yang menghubungkan Lapangan Merdeka dengan Stasiun KAI-Medan, yang selesai dibangun Desember 2014 lalu. Sampai saat ini proyek anggaran sebesar Rp 35 Miliar tersebut tidak memberi manfaat apapun bagi warga kota karena tak kunjung difungsikan dan terbengkalai.⁷ Permasalahan terkait pembuatan anggaran di daerah itu karena inkonsistensi yang dilakukan oleh pemerintah daerah, Akibat inkonsistensi tersebut banyak program yang ingin dijalankan oleh pemerintah daerah tidak sesuai dengan anggaran yang direncanakan. Alhasil, ketika masuk dalam tahap pelaksanaan program tersebut sulit dijalankan. Hal ini menyebabkan realisasi penggunaan anggaran tidak mencapai target sampai akhir tahun sehingga pertanggungjawaban penggunaan dana yang ekonomis dan efektif sering tidak tercapai.⁸

⁷Putra TJ, "Sky Bridge: Proyek Rp35 Miliar yang Terbengkalai 5 Tahun", <https://www.gatra.com>. Diunduh pada tanggal 2 Desember 2019.

⁸Muhammad Rizki Saputra, "Permasalahan Anggaran", <https://www.kompasiana.com>. Diunduh pada tanggal 2 Desember 2019.

Pemerintah Kota Medan seharusnya lebih memprioritaskan permasalahan perbaikan jalan terutama ruas jalan protokol di Kota Medan karena masih banyak yang mengalami kerusakan, lampu penerangan jalan umum yang tidak terawat, permasalahan banjir yang masih terjadi di beberapa kawasan dan masih banyak drainase yang rusak.

Kemudian dalam hal penerimaan, salah satu potensi penerimaan terbesar adalah retribusi parkir. Jumlah kendaraan di Kota Medan sekitar 2,7 juta kendaraan. Misalnya setiap hari 10 persen saja kendaraan yang parkir dan membayar retribusi. Dengan biaya retribusi parkir sekitar Rp1.000 per kendaraan, seharusnya penerimaan daerah setahun bisa mencapai Rp98,5 miliar. Itu baru hitungan yang sangat minimum dan hanya dari retribusi parkir saja, belum lagi penerimaan dari retribusi lainnya. Rasanya potensinya seharusnya lebih besar lagi. Oleh karena itu perlu dicari cara agar tidak terjadi kebocoran penerimaan yang lebih besar. Rakyat mengeluh karena hampir di setiap jalan baik di tempat usaha dipungut parkir sepeda motor dan mobil. Lalu kemana penerimaan itu semua? Sementara target pendapatan setiap tahun yang selalu dinaikkan, padahal penerimaan tahun-tahun sebelumnya tidak pernah terealisasi.⁹

Permasalahan lain yang terjadi adalah perencanaan dan pengelolaan APBD saat ini belum maksimal sesuai Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Permendagri nomor 13 Tahun 2006 yang dijadikan standar untuk penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah terhadap pencapaian target dan realisasi program dan kebijakan baik dalam komponen pendapatan, komponen belanja, maupun komponen pembiayaan menjadi lemah posisinya.

Penilaian keberhasilan APBD sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah lebih ditekankan pada pencapaian target, sehingga kurang

⁹Anita Sinuhaji, "5 Penyebab PAD Pemko Medan Menurun", <https://medaninside.com/5-penyebab-pad-pemko-medan-menurun/>. Diunduh pada tanggal 2 Desember 2019

memperhatikan bagaimana proses penganggaran yang dilakukan mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap penilaian.

Berikut ini adalah laporan realisasi anggaran pemerintah kota medan dari tahun 2014-2018:

Tabel 1.1
Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Medan
Tahun 2014-2018
(dalam rupiah)

Tahun	Uraian	Anggaran	Realisasi
2014	Pendapatan Daerah	4.560.412.529.543,87	4.042.115.828.231,62
	Belanja	4.625.169.942.881	3.723.643.299.085,60
2015	Pendapatan Daerah	5.046.111.839.162,45	4.259.044.490.715,42
	Belanja	5.467.952.757.114	4.374.968.274.136,94
2016	Pendapatan Daerah	5.490.162.683.364,97	4.308.116.916.024,91
	Belanja	5.735.922.591.995	4.523.672.134.655,15
2017	Pendapatan Daerah	5.523.623.117.419	4.409.065.482.201
	Belanja	5.554.084.308.979,40	4.395.825.169.225
2018	Pendapatan Daerah	5.238.966.379.116	4.253.618.758.533
	Belanja	5.451.085.765.928	4.215.003.353.126

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Pada tabel laporan realisasi anggaran diatas menjelaskan bahwa laporan realisasi anggaran pemerintah Kota Medan meliputi pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Medan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Medan jika dilihat dari tahun 2014-2017 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun pada tahun 2018, Anggaran realisasi pada belanja dan pendapatan daerah mengalami penurunan, akibat tidak adanya anggaran P-APBD kota medan di tahun 2018.

Penelitian ini pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, Pane (2017), dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pemerintah Kota Medan masih tergolong kurang signifikan yang menyebabkan rasio ekonomis masih kurang ekonomis, rasio efisiensi masih kurang efisien, dan rasio efektivitas masih kurang efektif. Dampak dari pengukuran tersebut berdampak langsung terhadap penerapan atau rencana belanja yang sudah direncanakan sebelumnya dan peningkatan akses dan kualitas infrastruktur serta Utilitas Kota.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian. Adapun judul yang diangkat penulis dalam penelitian ini adalah **“Analisis Value for Money Anggaran Pendapatan pada Pemerintah Kota Medan”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan APBD sering terjadi pemborosan penggunaan anggaran belanja yang dibelanjakan dan tidak tepat sasaran yang seharusnya dapat dirasakan oleh masyarakat umum. Salah satu contohnya adalah proyek pembangunan Sky Bridge yang sudah selesai dibuat tahun 2014 namun sampai saat ini masih belum difungsikan.
2. Masih terjadi pembocoran penerimaan terutama dalam retribusi parkir. Hal ini menyebabkan defisitnya pendapatan dikarenakan oleh target penerimaan di sejumlah pos meleset.
3. Perencanaan dan pengelolaan APBD saat ini belum maksimal sesuai Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Permendagri nomor 13 Tahun 2006 yang dijadikan standar untuk penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah terhadap pencapaian target dan realisasi program dan kebijakan baik dalam komponen pendapatan, komponen belanja, maupun komponen pembiayaan menjadi lemah posisinya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, maka dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan menjadi focus penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kota Medan berdasarkan Rasio *Value for Money*?
2. Apakah rasio *Value for Money* pada Pemerintah Kota Medan sudah memenuhi standar berdasarkan dengan Kepmendagri No. 600.900-327?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Kota Medan dengan menggunakan metode *Value for Money*.
- b. Untuk mengetahui apakah rasio *Value for Money* dapat memenuhi standar berdasarkan dengan Kepmendagri No. 600.900-237.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari dilakukannya penelitian ini adalah:

- a. Bagi Penulis, menambah pemahaman penulis tentang pengukuran kinerja keuangan pemerintah jika diukur dengan *Value for Money*.
- b. Bagi Pemerintah Daerah, sebagai tambahan bahan referensi dalam menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah dan alternatif masukan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah.
- c. Bagi Peneliti Selanjutnya, dapat menjadi referensi dan perbandingan bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian.

E. Batasan Istilah

1. Value for Money

Value for money adalah istilah yang digunakan untuk menilai apakah organisasi telah memperoleh manfaat maksimal dari barang dan jasa yang baik dalam sumber daya yang tersedia untuk itu. *Value for Money* tidak hanya mengukur biaya barang dan jasa, tetapi juga memperhitungkan campuran kualitas, biaya, penggunaan sumber daya, kesesuaian untuk tujuan, ketepatan waktu, dan kenyamanan untuk menilai apakah keseluruhan itu merupakan nilai yang baik.¹⁰ Untuk membatasi rumusan masalah yang telah dibuat agar tidak meluas dan terfokus pada pokok permasalahan, maka perlu diberi batasan yaitu mengenai analisis rasio dengan menggunakan metode *Value for Money* yang meliputi rasio ekonomi, efisiensi, dan efektivitas dimana sebagai salah satu alat untuk menilai kinerja keuangan Pemerintah Daerah di Kota Medan. Untuk membatasi rumusan masalah yang telah dibuat agar tidak meluas dan terfokus pada pokok permasalahan, maka perlu diberi batasan yaitu mengenai analisis rasio dengan menggunakan metode *Value for Money* yang meliputi rasio ekonomi, efisiensi, dan efektivitas dimana sebagai salah satu alat untuk menilai kinerja keuangan Pemerintah Daerah di Kota Medan.

2. Anggaran Pendapatan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan cermin dari pilihan-pilihan ekonomis dan sosial masyarakat suatu daerah. Untuk menjalankan peran yang dimandatkan masyarakat untuk menjadikan pilihan-pilihan tersebut. Pemerintah daerah harus melaksanakan fungsi pertama, pengumpulan sumber daya yang mencukupi dengan cara yang tepat, dan kedua, pengalokasian dan penggunaan sumber daya tersebut secara responsif, efisien dan efektif. Dalam penyusunan penelitian ini, penulis memandang perlu untuk memberikan batasan

¹⁰Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, h. 53.

masalah yang dimaksudkan untuk mempertegas ruang lingkup penelitian sehingga dapat dicapai sasaran yang diharapkan. Maka penulis hanya akan membahas Anggaran Pendapatan dalam penelitian ini.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Landasan Teori

1. Keuangan Daerah

a. Pengertian Keuangan Daerah

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk juga di dalamnya segala bentuk kekayaan ataupun harta yang berhubungan dengan hak dan kewajiban atas daerah tersebut, yang terdapat dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.¹¹

Keuangan Daerah dapat juga diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, juga dengan segala satuan, baik yang berupa uang maupun barang, yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum di miliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku.¹²

Dari pengertian diatas dapat dilihat bahwa dalam keuangan daerah terdapat dua unsur penting yaitu:

- 1) Semua hak dimaksudkan sebagai hak untuk memungut pajak daerah, retribusi daerah dan/atau penerimaan dan sumber-sumber lain sesuai ketentuan yang berlaku merupakan penerimaan daerah sehingga menambah kekayaan daerah.
- 2) Kewajiban daerah dapat berupa kewajiban untuk membayar atau sehubungan dengan adanya tagihan kepada daerah dalam rangka pembiayaan rumah tangga daerah serta pelaksanaan tugas pembangunan oleh daerah yang bersangkutan.

¹¹Abdul Halim, *Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Ketiga*, (Jakarta:Salemba Empat, 2007), h. 19.

¹²Ibid, h. 22.

b. Manajemen Keuangan Daerah

Guna mewujudkan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, dibutuhkan pengelolaan dengan suatu sistem manajemen keuangan yang jelas dan berdaya guna. Manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dari pengertian tersebut, jelas bahwa manajemen mempunyai empat fungsi dasar, yaitu perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian.

Konsep dasar dari manajemen tersebut dapat diaplikasikan dalam berbagai jenis organisasi, termasuk lingkungan organisasi sektor publik tidak terkecuali dalam pengelolaan keuangan daerah. Beberapa prinsip penting manajemen keuangan daerah yaitu:

- 1) Taat pada peraturan perundang-undangan, dengan maksud bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- 2) Efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
- 3) Efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
- 4) Ekonomis merupakan perolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga terendah.
- 5) Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluasluasnya tentang keuangan daerah.
- 6) Bertanggungjawab merupakan wujud dari kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya

dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

- 7) Keadilan adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang objektif.
- 8) Kepatutan adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proposional.
- 9) Manfaat maksudnya keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Secara garis besar, manajemen keuangan daerah dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu manajemen penerimaan daerah dan manajemen pengeluaran daerah. Evaluasi terhadap pengelolaan keuangan daerah dan pembiayaan pembangunan daerah mempunyai implikasi yang sangat luas. Kedua komponen tersebut akan sangat menentukan kedudukan suatu pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.¹³

c. Sumber Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah, sebagaimana yang telah didefinisikan sebelumnya, mempunyai makna sebagai hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Sumber pendapatan daerah diperoleh dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD terdiri dari:

a) Pajak Daerah

Ketentuan mengenai pajak daerah ditetapkan dengan undang-undang. Sedangkan penentuan tarif dan tata cara pemungutan pajak

¹³Abdul Halim, Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah, (Yogyakarta: Seri Bunga Rampai UUP AMP YMPN, 2002), h. 27.

daerah ditetapkan dengan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b) Retribusi Daerah

Sebagaimana pajak daerah, ketentuan mengenai kontribusi juga ditetapkan dengan undang-undang. Sementara penentuan tarif dan tata cara pemungutan retribusi daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup: bagian laba atas penyertaan modal baik pada perusahaan milik daerah, perusahaan milik pemerintah, maupun pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat. Ketentuan mengenai hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

d) Lain-lain PAD yang sah

Meliputi dari: hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih antara nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, serta komisi, potongan, apapun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau jasa oleh daerah.

2. Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dilakukan kepada daerah untuk mendanai keseluruhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sumber dana yang berasal dari pos Dana Perimbangan terdiri dari:

a) Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

b) Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

c) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Pemerintah menetapkan kriteria DAK yang meliputi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Kriteria umum ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dalam APBD. Kriteria khusus ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan karakteristik daerah. Sedangkan kriteria teknis diterapkan oleh kementerian negara departemen teknis.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang diterapkan.

a) Hibah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/ lembaga asing, badan/ lembaga dalam negeri atau perseorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan/atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali.

b) Dana Darurat adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa, dan/atau krisis ekonomi.

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

a. Anggaran

Anggaran adalah perkiraan/ perhitungan/ aturan/ taksiran mengenai penerimaan dan pengeluaran kas yang diharapkan untuk periode yang akan datang.¹⁴ Anggaran merupakan suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif, yang diukur dalam satuan moneter standar dan satuan ukuran yang lain, mencakup jangka waktu satu tahun.¹⁵

Anggaran pada umumnya memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan selain keuangan.
- b. Anggaran umumnya mencakup jangka waktu satu tahun.
- c. Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen, yang berarti bahwa para manajer setuju untuk menerima tanggung jawab guna mencapai sasaran yang ditetapkan dalam anggaran.
- d. Usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh pihak yang berwenang lebih tinggi dari penyusun anggaran.
- e. Setelah disetujui, anggaran hanya dapat diubah dibawah kondisi tertentu.
- f. Secara berkala, kinerja keuangan sesungguhnya dibandingkan dengan anggaran, dan selisihnya dianalisis dan dijelaskan.¹⁶

b. Anggaran Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan penerimaan yang sangat penting bagi pemerintah daerah dalam menunjang pembangunan daerah guna membiayai proyek-proyek dan kegiatan-kegiatan daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang

¹⁴Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005.

¹⁵Mulyadi, *Sistem Akuntansi, Edisi Ketiga*, (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, 2003), h. 488.

¹⁶Indra Bastian, *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Erlangga, 2005) h. 81.

dimaksud dengan Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu menjadi hak daerah.

Sedangkan menurut Halim yang menyatakan bahwa semua penerimaan daerah aktiva atau penurunan utang dalam berbagai sumber dalam periode tahun anggaran bersangkutan.¹⁷

Berdasarkan kedua pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pendapatan daerah merupakan penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah yang dapat ditinjau dari tingkat kenaikan aktiva ataupun penurunan utang yang dapat digunakan oleh pemerintah dalam membangun dan mengembangkan suatu daerah dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

c. Anggaran Belanja Daerah

Menurut Halim, belanja daerah adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan wewenang dan tanggungjawab kepada masyarakat dan pemerintah di atasnya.¹⁸

Sedangkan menurut Indra Bastian dan Gatot Soepriyono yang mengemukakan bahwa belanja daerah adalah penurunan manfaat ekonomis masa depan atau jasa potensial selama periode pelaporan dalam bentuk arus kas keluar, atau konsumsi aktiva/ekuitas netto, selain yang berhubungan dengan distribusi ke entitas ekonomi itu sendiri.¹⁹

Dari pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi/kabupaten/kota yang terdiri atas urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama pemerintah pusat dan pemerintah

¹⁷Abdul Halim, *Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah*, h. 64.

¹⁸Ibid, h. 67.

¹⁹Indra Bastian dan Gatot Supriyanto, *Sistem Akuntansi Sektor Publik, Konsep Untuk Pemerintah Daerah*, (Jakarta:Salemba Empat, 2003), h. 57.

daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

d. Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan cermin dari pilihan-pilihan ekonomis dan sosial masyarakat suatu daerah untuk menjalankan peran yang dimandatkan masyarakat untuk menjadikan pilihan-pilihan tersebut. Pemerintah daerah harus melaksanakan fungsi pertama, pengumpulan sumber daya yang mencukupi dengan cara yang tepat, dan kedua, pengalokasian dan penggunaan sumber daya tersebut secara responsif, efisien dan efektif. Fungsi pertama berkaitan dengan sisi penerimaan (pendapatan) dari APBD sedangkan fungsi kedua dari sisi pengeluaran (belanja).²⁰

Pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas menjalankan mandat dari rakyat membutuhkan biaya yang besar. Untuk pembiayaan tersebut pemerintah daerah mempunyai beberapa sumber penerimaan daerah yang dituangkan dalam anggaran. Anggaran yang dibuat akan mencerminkan politik pengeluaran pemerintah yang rasional baik secara kuantitatif maupun kualitatif sehingga akan terlihat:²¹

1. Adanya pertanggungjawaban pemungutan pajak dan pungutan lain-lain oleh pemerintah misalnya untuk memperlancar ekonomi.
2. Adanya hubungan yang erat antara fasilitas penggunaan dana dan penarikannya.
3. Adanya pola pengeluaran pemerintah yang dapat dipakai sebagai pertimbangan dalam menentukan pola tingkat distribusi penghasilan dalam ekonomi.

²⁰Ruslina Nadaek, *Analisis Rasio Keuangan APBD untuk Menilai Kinerja Pemerintah Daerah, Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2003).

²¹Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, h. 10.

e. Karakteristik Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Karakteristik APBD menurut Abdul Halim antara lain:²²

1. APBD disusun oleh DPRD bersama-sama Kepala Daerah.
2. Pendekatan yang dipakai dalam penyusunan anggaran adalah pendekatan tradisional (line item) yaitu anggaran disusun berdasarkan jenis penerimaan dan jenis pengeluaran. Oleh karena itu, setiap baris dalam APBD menunjukkan tiap jenis penerimaan dan pengeluaran. penggunaan pendekatan ini bertujuan untuk melakukan pengendalian atas pengeluaran. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang paling tradisional (tertua) diantara berbagai pendekatan penyusunan anggaran.
3. Siklus APBD terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemeriksaan, penyusunan, dan penetapan perhitungan APBD. Penyusunan dan perhitungan APBD merupakan pertanggungjawaban APBD. Pertanggungjawaban itu dilakukan dengan menyampaikan perhitungan APBD kepada Menteri Dalam Negeri untuk Pemerintahan Daerah Tingkat I dan kepada Gubernur untuk Pemerintahan Daerah Tingkat II. Oleh karena itu, pertanggungjawaban bersifat vertikal.
4. Dalam tahap pengawasan dan pemeriksaan dan tahap penyusunan dan penentuan perhitungan APBD, pengendalian dan pemeriksaan/ audit bersifat keuangan. Hal ini tampak pada pengawasan pendapatan daerah dan pengawasan pengeluaran daerah.
5. Pengawasan terhadap pengeluaran daerah dilakukan berdasarkan 3 unsur utama, yaitu unsur ketaatan pada peraturan perundangan yang berlaku, unsur kehematan dan efisiensi, dan unsur hasil program (untuk proyek-proyek daerah).

²²Abdul Halim, *Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah*, hlm. 17.

6. Sistem akuntansi keuangan daerah menggunakan tata buku anggaran yaitu anggaran dan pembukuan saling berhubungan dan saling mempengaruhi.

f. Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Fungsi APBD menurut Mamesah, antara lain:²³

1. Menentukan jumlah pajak yang dibebankan pada rakyat daerah yang bersangkutan.
2. Merupakan suatu sarana untuk mewujudkan otonomi yang nyata dan bertanggungjawab.
3. Memberi isi dan arti kepada tanggung jawab Pemerintah Daerah umumnya dan kepada daerah khususnya, karena APBD itu menggambarkan seluruh kebijakan Pemerintah Daerah.
4. Merupakan suatu sarana untuk melaksanakan pengawasan terhadap daerah dengan cara yang lebih mudah dan berhasil guna.
5. Merupakan suatu pemberian kuasa kepada Kepala Daerah didalam batas-batas tertentu.

3. Kinerja Keuangan Daerah

a. Pengertian Kinerja Keuangan Daerah dan Indikator Kinerja Keuangan Daerah

1. Pengertian Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan, baik oleh pribadi maupun organisasi. Apabila pencapaian sesuai dengan yang direncanakan, maka kinerja yang dilakukan terlaksana dengan baik. Apabila pencapaian melebihi dari apa yang direncanakan dapat dikatakan kinerjanya sangat bagus. Apabila pencapaian tidak sesuai dengan apa yang direncanakan atau kurang dari apa yang direncanakan, maka kinerjanya jelek. Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan.

²³D. J. Mamesah, *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*, (Jakarta: PT Gramedia Pusat Utama, 1995), h. 18.

Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja di masa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut.

Menurut Mahsun, pengukuran kinerja keuangan daerah dapat diuraikan sebagai berikut:²⁴

- **Analisis Anggaran**

Adalah pengukuran kinerja yang dilakukan dengan cara membandingkan anggaran dengan realisasinya. Hasil yang diperoleh berupa selisih lebih atau selisih kurang. Teknik ini berfokus pada kinerja input yang bersifat financial. Data yang digunakan untuk dasar analisis adalah anggaran dan laporan realisasi anggaran.

- **Analisis Rasio Laporan Keuangan**

Pengukuran kinerja yang didasarkan atas perhitungan rasio-rasio keuangan, misalnya rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio solvabilitas, dan rasio pasar. Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan organisasi dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Rasio aktivitas mengukur sejauh mana efektivitas penggunaan asset dengan melihat tingkat aktivitas asset tersebut. Rasio solvabilitas mengukur sejauh mana kemampuan organisasi memenuhi kewajiban jangka panjang. Rasio pasar mengetahui perkembangan nilai organisasi (perusahaan) relatif terhadap nilai buku organisasi (perusahaan) tersebut. Data yang digunakan sebagai dasar untuk analisis adalah neraca.

- **Balance Scorecard Method**

Pengukuran kinerja dengan berbasis pada aspek financial dan nonfinansial. Dimensi pengukuran mencakup empat perspektif yaitu

²⁴Mahsun Muhammad, *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*, (Yogyakarta: BPFE,2016), h. 131.

perspektif financial, perspektif pelanggan (users), perspektif proses bisnis internal dan perspektif inovasi-pembelajaran. Balanced Scorecard Method banyak digunakan untuk membantu pengukuran kinerja sektor publik.

- **Pengukuran *Value for Money***

Pengukuran dan pemeriksaan kinerja dengan berdasarkan pada ukuran ekonomis, efisien dan efektivitas. Ekonomis berkaitan dengan pengukuran seberapa hemat pengeluaran yang dilakukan. Efisien berhubungan dengan pengukuran seberapa benar cara yang digunakan yaitu membandingkan input dengan output. Efektivitas berkaitan dengan pengukuran seberapa tepat dalam pencapaian target yaitu dengan membandingkan hasil yang ditargetkan dengan realisasinya.

Salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah adalah dengan menggunakan *Value for Money* yaitu melaksanakan analisis rasio terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya.²⁵ Penggunaan analisis rasio pada sektor publik khususnya terhadap APBD belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Meskipun demikian dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien dan akuntabel, analisis rasio terhadap APBD perlu dilaksanakan meskipun kaidah pengakuntansian dalam APBD berbeda dengan keuangan yang dimiliki oleh perusahaan swasta.²⁶

Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan

²⁵Abdul Halim, *Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Ketiga*, h. 230.

²⁶Ibid, h. 231-232.

dengan rasio keuangan pemerintah daerah tertentu dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat ataupun potensi daerahnya relatif sama untuk dilihat bagaimana posisi keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya.

Pengertian analisis keuangan itu sendiri adalah sebuah cara untuk menganalisis laporan keuangan yang mengungkapkan hubungan antara suatu jumlah dengan jumlah lainnya atau antara suatu pos dengan pos lainnya. Penggunaan analisis keuangan sebagai alat analisis kinerja secara umum telah digunakan oleh lembaga komersial.²⁷ Dalam rangka mengukur kinerja dan kemampuan keuangan daerah dalam mengelola diperlukan analisis rasio keuangan terhadap pendapatan belanja daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien dan akuntabel, analisis rasio keuangan terhadap pendapatan belanja daerah perlu dilaksanakan.²⁸

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Halim dalam bukunya yang berjudul *Akuntansi Keuangan Daerah*, analisis rasio keuangan dibagi menjadi dua yaitu analisis kinerja keuangan dan analisis kemampuan keuangan.²⁹

2. Indikator Kinerja Keuangan Daerah

Istilah “ukuran kinerja” pada dasarnya berbeda dengan istilah “indikator kinerja”. Ukuran kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara langsung, sedangkan indikator kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung, yaitu hal-hal yang sifatnya hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja.

Inti dari pengukuran kinerja dari organisasi pemerintahan adalah implementasi konsep Value for Money. Value for Money memiliki tiga komponen yaitu: ekonomi, efisiensi dan efektif. Untuk bisa mengukur tingkat

²⁷Deddi Nordiawan, *Akuntansi Pemerintahan*, h. 166.

²⁸Indra Bastian dan Gatot Supriyanto, *Sistem Akuntansi Sektor Publik, Konsep Untuk Pemerintah Daerah*, h. 65.

²⁹Abdul Halim, *Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Ketiga*, h. 223.

ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, organisasi pemerintahan harus dapat mengetahui tingkat input, output, dan outcome, dimana Halim menjelaskan:³⁰

1) Indikator Masukan (input)

Input adalah semua jenis sumber daya masukan yang digunakan dalam suatu proses untuk menghasilkan output. Pengukuran input adalah pengukuran sumber daya yang dikonsumsi oleh suatu proses dalam rangka menghasilkan output.

2) Indikator Keluaran (output)

Output adalah hasil langsung dari suatu proses. Pengukuran output adalah pengukuran keluaran yang dihasilkan dari proses. Ukuran output menunjukkan hasil implementasi program atau aktivitas.

3) Indikator Pencapaian Hasil (Outcome)

Outcome adalah hasil yang dicapai dari suatu program atau kegiatan yang dibandingkan dengan hasil yang diharapkan. Pengukuran outcome adalah mengukur nilai kualitas dari output tersebut.

Peran indikator kinerja bagi pemerintahan adalah sebagai berikut:³¹

- a) Untuk membantu memperjelas tujuan organisasi.
- b) Untuk mengevaluasi target aktif yang dihasilkan.
- c) Sebagai masukan untuk menentukan skema intensif manajerial.
- d) Memungkinkan bagi pemakai jasa layanan pemerintah untuk melakukan pilihan.
- e) Untuk menunjukkan standart kinerja.
- f) Untuk menunjukkan efektivitas.
- g) Untuk membantu menentukan aktivitas yang memiliki efektivitas biaya yang paling baik untuk mencapai target sasaran.
- h) Untuk meningkatkan wilayah, bagian, atau proses yang masih potensial untuk dilakukan penghematan biaya.

³⁰Abdul Halim, *Akuntansi Sektor Publik*, (Jakarta: Salemba Empat, 2012), h. 135

³¹Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, 2002, h. 128.

4. *Value for Money*

a. **Pengertian *Value for Money* dan Indikator *Value for Money***

1. **Pengertian *Value for Money***

Value for money merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah. Kinerja pemerintah tidak dapat dinilai dari output yang dihasilkan saja, akan tetapi harus mempertimbangkan input, output, dan outcome secara bersama-sama. Menurut University of Cambridge, Pendanaan Pendidikan Tinggi Dewan Inggris (HEFCE) menggambarkan nilai uang (*Value for Money*) adalah istilah yang digunakan untuk menilai apakah organisasi telah memperoleh manfaat maksimal dari barang dan jasa yang baik, dalam sumber daya yang tersedia untuk itu.

Value for money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.³² *Value for Money* berupaya dalam mengelola anggaran publik berdasarkan prinsip 3E yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Ekonomi: perolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Ekonomi merupakan perbandingan input dengan input value yang dinyatakan dalam satuan moneter. Efisiensi: perbandingan output/input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Efektivitas: tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan outcome dengan input. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagai kesepakatan dan komitmen bersama antara pemerintah dan legislatif dengan ruh reformasi.

Kriteria pokok yang mendasari pelaksanaan manajemen publik dewasa ini adalah ekonomi, efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas publik. Tujuan yang dikehendaki oleh masyarakat mencakup

³²Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, 2002 h. 4.

pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan *value for money* yaitu: ekonomis (hemat cermat) dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisiensi (berdaya guna) dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan (maximizing benefits and minimizing costs), serta efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran.

2. Indikator *Value for Money*

Peranan indikator kinerja dalam menyediakan informasi sebagai pertimbangan untuk pembuatan keputusan. Hal ini tidak berarti bahwa suatu indikator akan memberikan ukuran pencapaian program yang definitif.

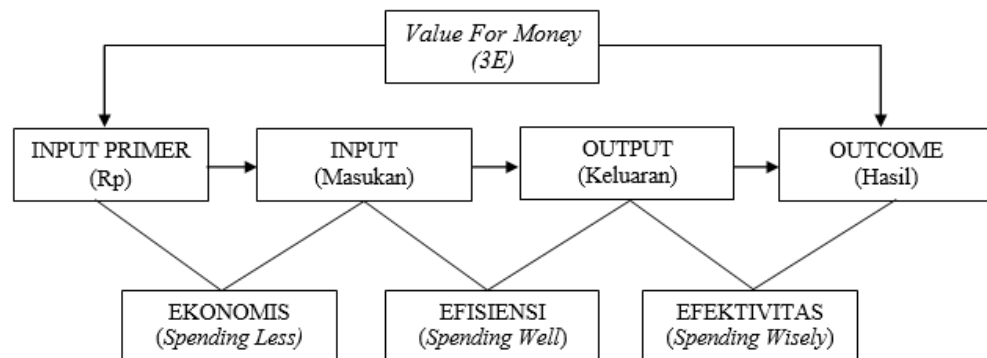
Indikator *Value for Money* dibagi menjadi dua bagian seperti yang dijelaskan antara lain:³³

- 1) Indikator alokasi biaya (ekonomi dan efisiensi)
- 2) Indikator kualitas pelayanan (efektivitas)

Indikator kinerja dapat dimanfaatkan oleh pihak internal maupun eksternal. Pihak internal dapat menggunakannya dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan serta efisiensi biaya. Dengan kata lain, indikator kinerja berperan untuk menunjukkan, memberikan indikasi atau memfokuskan perhatian pada bidang yang relevan dilakukan tindakan perbaikan.

Pihak eksternal dapat menggunakan indikator kinerja sebagai kontrol dan sekaligus sebagai informasi dalam rangka mengukur tingkat akuntabilitas publik. Pembuatan dan penggunaan indikator kinerja tersebut membantu setiap pelaku utama dalam proses pengeluaran publik. Indikator kinerja akan membantu para manajer publik untuk memonitor pencapaian program dan mengidentifikasi masalah yang penting.

³³Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, 2009, h. 131.



Gambar 2.1 Skema Value for Money

b. Tujuan Value For Money

Tujuan pelaksanaan *Value for Money* adalah, ekonomi: hemat cermat dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisiensi: Berdaya guna dalam penggunaan sumber daya, efektivitas: berhasil guna dalam arti mencapai tujuan dan sasaran.

- 1) Meningkatkan efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran.
- 2) Meningkatkan mutu pelayanan publik
- 3) Menurunkan biaya pelayanan publik karena hilangnya inefisiensi dan terjadinya penghematan dalam penggunaan input
- 4) Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik
- 5) Meningkatkan kesadaran akan uang publik (*public costs awareness*) sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik.

c. Manfaat Implementasi Value for Money

Penerapan konsep *value for money* dalam pengukuran kinerja pada organisasi sektor publik tentunya memberikan manfaat bagi organisasi itu sendiri maupun masyarakat. Manfaat yang dikendaki dalam pelaksanaan *value for money*

pada organisasi sektor publik yaitu ekonomis dalam penggunaan sumber daya dan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran.³⁴

Adapun manfaat yang diharapkan dengan adanya implementasi *value for money* adalah:

- 1) Meningkatkan efektivitas pelayanan publik
- 2) Meningkatkan mutu pelayanan publik
- 3) Menurunkan biaya pelayanan publik karena efisiensi dan penghematan input
- 4) Alokasi belanja yang berorientasi pada kepentingan publik
- 5) Meningkatkan kesadaran atas penggunaan uang publik, demi akuntabilitas³⁵

Dari berbagai manfaat yang disebutkan diatas, dapat disimpulkan bahwa penerapan *value for money* dalam pengukuran kinerja organisasi sektor publik sangat membantu suatu instansi pemerintah agar dapat memberikan pelayanan pada masyarakat dengan tepat sasaran sehingga tercipta mutu pelayanan yang baik dengan penggunaan sumber daya yang ekonomis dan efisien.

d. Langkah-langkah Pengukuran *Value for Money*

1. Pengukuran Ekonomi

Pengukuran ekonomi hanya mempertimbangkan masukan yang digunakan, ekonomi merupakan ukuran relatif. Ekonomi merupakan perbandingan antara input dan output value.³⁶ Input dalam hal ini adalah target anggaran, sedangkan output value adalah realisasi anggaran. Jadi dapat disimpulkan bahwa suatu kinerja dikatakan ekonomis apabila realisasi anggaran lebih kecil dari pada target anggaran dan dapat mencapai output sesuai dengan yang telah ditetapkan.

³⁴Ibid, h. 130.

³⁵Muindro Renyowijoyo, *Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba Edisi Ketiga*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), h. 9.

³⁶Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, 2009 h. 4.

Dari penjelasan tersebut, secara matematis pengukuran ekonomi dapat dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Ekonomi} = \frac{\text{Realisasi Biaya Untuk Memperoleh Pendapatan}}{\text{Anggaran Biaya Untuk Memperoleh Pendapatan}} \times 100 \%$$

Untuk mengetahui seberapa besar tingkat rasio ekonomis dari hasil perhitungan yang dilakukan, maka dapat menggunakan formula rasio ekonomis adalah klasifikasi atas pengukuran rasio ekonomi.

Tabel 2.1
Klasifikasi Pengukuran Ekonomis

Persentase	Kriteria
100% Keatas	Sangat Ekonomis
90%-100%	Ekonomis
80%-90%	Cukup Ekonomis
60%-80%	Kurang Ekonomis
Kurang dari 60%	Tidak Ekonomis

Sumber: Kepmendagri No.600.900-327

2. Pengukuran Efisiensi

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan. Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya.³⁷

Pengukuran tingkat efisiensi memerlukan data-data realisasi biaya untuk memperoleh pendapatan dan data realisasi pendapatan³⁸. Rumus perhitungannya sebagai berikut:

³⁷Abdul Halim, *Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Keempat*, (Jakarta: Salemba Empat, 2012), h. 133.

³⁸Muhammad Mahsun, *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*, h. 187.

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Biaya Untuk Memperoleh Pendapatan}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100 \%$$

Pengukuran efisiensi tidak dinyatakan dalam bentuk absolut tetapi dalam bentuk relatif karena efisiensi diukur dengan membandingkan keluaran dan masukan. Perbaikan efisiensi dapat dilakukan dengan:

- 1) Meningkatkan output pada tingkat input yang sama
- 2) Meningkatkan output dalam proporsi yang lebih besar daripada proporsi peningkatan input
- 3) Menurunkan input pada tingkatan output yang sama
- 4) Menurunkan input dalam proporsi yang lebih bes
- 5) Menurunkan input dalam proporsi yang lebih besar daripada proporsi penurunan output.

Untuk mengetahui seberapa besar tingkat rasio efisiensi dari hasil perhitungan yang dilakukan, maka dapat menggunakan formula rasio efisiensi adalah klasifikasi atas pengukuran rasio efisiensi.

Tabel 2.2
Klasifikasi Pengukuran Efisiensi

Persentase	Kriteria
100% Keatas	Tidak Efisien
90%-100%	Kurang Efisien
80%-90%	Cukup Efisien
60%-80%	Efisien
Kurang dari 60%	Sangat Efisien

Sumber: Kepmendagri No.600.900-327

3. Pengukuran Efektivitas

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Suatu organisasi sektor publik dapat dikatakan efektif apabila organisasi

tersebut dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan³⁹. Jadi secara sistematis, efektivitas dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Target Pendapatan}} \times 100 \%$$

Untuk mengetahui tingkat efektivitas dari hasil perhitungan menggunakan formula efektivitas adalah klasifikasi pengukuran efektivitas.

Tabel 2.3
Klasifikasi Pengukuran Efektivitas

Persentase	Kriteria
100% Keatas	Sangat Efektif
90%-100%	Efektif
80%-90%	Cukup Efektif
60%-80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber: Kepmendagri No.600.900-327

5. Konsep Islam Mengenai Anggaran dan Kinerja Keuangan Daerah

Terdapat ayat Alquran yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah (anggaran) yaitu dalam surah An-Nahl (16) : 90

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٩٠

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkar dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.⁴⁰

³⁹Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, 2009, h. 134.

⁴⁰Q.S. An- Nahl (16):90.

Kaitannya dengan anggaran yaitu, dalam menyusun anggaran hendaklah dilakukan secara adil, tidak memihak kepada siapapun. Serta bertujuan untuk kepentingan bersama. Bukan menciptakan maupun menganiaya orang lain. Al Mustadrak disebutkan suatu riwayat yang bersumber dari Ibnu Masud yang telah mengatakan bahwa ayat ini yakni ayat 90 surah An-Nahl adalah ayat yang paling padat mengandung anjuran melakukan kebajikan dan menjauhi keburukan didalam Alquran.

Q.S Al-Furqaan (25) : 67

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

Artinya: “Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian”.⁴¹

Q.S al-Hasyr (59) : 7

..كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

Artinya: “...supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu..”⁴²

Dari ayat diatas (Q.S Al-Hasyr : 7) Allah SWT jelas-jelas memerintahkan supaya kekayaan dan sumber daya didistribusikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Untuk mendistribusikan sumber daya dan kekayaan, negara dapat melakukannya dengan intervensi langsung maupun melalui regulasi. Bentuk intervensi langsung antarlain menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara. Dalam sisi belanja negara, pemerintah dapat mendistribusikan sumber daya

⁴¹Q.S. Al-Furqaan (25):67.

⁴²Q.S. Al-Hasyr (59):7.

dengan cara melalui pembangunan infrastruktur yang memadai, sehingga seluruh wilayah dapat menikmati secara adil.⁴³

Secara syariat, anggaran belanja negara harus digunakan untuk kepentingan yang menjadi prioritas, yaitu pemenuhan kebutuhan dasar minimal pertahanan, penegakan hukum, kegiatan dakwah islam, amar makruf nahi munkar, penegakan keadilan, administrasi publik, serta untuk melayani kepentingan sosial lainnya. Yang tidak dapat disediakan oleh sektor privat dan pasar. Dengan demikian, ketika negara dijalankan dengan prinsip-prinsip islam, maka seluruh kegiatan negara ini harus patuh dan taat terhadap ketentuan yang dikehendaki oleh syariat.⁴⁴

Pemanfaatan anggaran belanja adalah untuk kepentingan penyediaan barang publik sebagaimana hal ini juga sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan sosial suatu negara. Subsidi untuk kalangan lemah, pengeluaran untuk melakukan treatment terhadap kondisi ekonomi yang terganggu sehingga menjadi stabil kembali, juga untuk mencukupi kebutuhan modal dan investasi yang mendorong pembangunan ekonomi dan peningkatan kapasitas produksi suatu negara.⁴⁵

Didalam Islam kinerja juga dibahas agar manusia lebih baik lagi dalam melakukan suatu pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya (bermuamalah). Adapun ayat yang menjadi rujukan dalam penelitian ini adalah QS at-Taubah (9): 105

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى
عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠٥

Artinya : *“Dan Katakanlah: ‘Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”*⁴⁶

⁴³Nurul Huda, et.al., *Publik Keuangan*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 65.

⁴⁴Nurul Huda, et.al., *Publik Keuangan*, h. 76.

⁴⁵Ibid, h. 76.

⁴⁶Q.S. At-Taubah (9):105.

Tema “kerja” pada ayat diatas diungkap lewat kata ‘amal. Para mufassir memahami kata ‘amal pada ayat tersebut mengacu pada arti amal-amal saleh. Bahkan ada kesan, kata amal dipahami sebagai ibadah.⁴⁷

Pemahaman kata amal (kerja) sebagai ibadah juga haruslah menjadi acuan bagi umat Islam dalam kehidupannya. Konteks kerja sebagai ibadah adalah dengan membawa Allah disetiap pekerjaan yang dilakukan. Sehingga bukan hanya pencapaian pada keuntungan saja, namun terhadap keberkahan kepada Allah SWT.

Ayat ini sesungguhnya bertujuan agar manusia mawas diri dan mengawasi amal-amal mereka, dengan jalan mengingatkan sesama mereka bahwa setiap amal yang baik dan yang buruk, memiliki hakikat yang tidak dapat disembunyikan, dan mempunyai saksi-saksi yang mengetahui dan melihat hakikatnya, yaitu Rasul dan para saksi amal-amal dari kelompok kaum mukminin, tentu saja setelah disaksikan Allah SWT.⁴⁸

Jadi harus disadari bahwa sesungguhnya pekerjaan yang dilakukan bukanlah semata-mata hanya mendapatkan keuntungan, tetapi juga keberkahan dari Allah SWT. tergantung dengan apa yang kita perbuat baik atau buruk akan ada balasan yang sesuai yang akan diberikan Allah kepada hambanya. Ayat yang berkesinambungan dengan ayat sebelumnya adalah Al-Baqarah (2): 143

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

Artinya :*“Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu.”*⁴⁹

⁴⁷Azhari Akmal Tarigan, *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi : Sebuah Eksplorasi Melalui Kata-kata Kunci dalam Al-Qur'an*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2014), h. 134.

⁴⁸M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Vol. 1, h. 238

⁴⁹Q.S Al-Baqarah (2):143.

Penggalan ayat diatas yang menyatakan agar kamu, wahai umat Islam, menjadi saksi atas perbuatan manusia dipahami juga dalam arti bahwa kaum muslimin dan muslimat akan menjadi saksi dimasa datang atas baik buruknya pandangan dan kelakuan manusia.

Maka dari itu umat Islam harus menyadari bahwasanya Allah selalu mengawasi dan mengetahui segala perbuatan kita. Serta sudah semestinya sesama umat Islam untuk saling mengingatkan dan mengawasi satu sama lain atas perbuatan yang akan dan telah kita lakukan sebagai pemegang amanah. Agar kita menjadi hamba Allah yang tidak merugi. Adapun kinerja atau amal dengan maknanya yang khusus yaitu melakukan pengkinerjaan atau usaha yang menjadi salah satu unsur terpenting dan titik tolak bagi proses kegiatan ekonomi seluruhnya.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang berkaitan dengan Analisis Value for Money Anggaran Pedapatan ini telah dilakukan oleh para peneliti pada berbagai instansi daerah dan karakteristik organisasi yang berbeda seperti yang penulis uraikan dibawah ini:

NO	NAMA	JUDUL PENELITIAN	METODOLOGI PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
1.	Suryaningsih Loi (2015) ⁵⁰	Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep <i>Value For Money</i> Pada Pemerintah Kota Medan	Assosiatif Kausal yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan sebab akibat dengan menggunakan metode analisis regresi linier berganda	Akuntabilitas (X1) dan transparansi (X2) secara bersama-sama atau simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran berkonsep <i>Value for Money</i> pada Pemerintah Kota Medan. Secara Parsial Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran. Transparansi secara parsial tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran. Berdasarkan hasil analisis korelasi ganda dalam penelitian ini secara keseluruhan menunjukkan R sebesar 0,619 yang berarti korelasi atau hubungan antara

⁵⁰Suryaningsih Loi, *Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep Value For Money Pada Pemerintah Kota Medan*, (Medan: Skripsi, Universitas HKBP Nomensen, 2015).

				variabel akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja anggaran kinerja sebesar 0,619. Artinya memiliki hubungan yang erat dan bersifat positif sehingga jika akuntabilitas dan transparansi semakin baik maka kinerja
2.	Deli Wany Adliana (2016) ⁵¹	Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep Value for Money Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhan Batu Selatan	Assosiatif Kausal yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan sebab akibat dengan menggunakan metode analisis regresi linier berganda	Secara parsial akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja anggaran berkonsep value for money, Secara parsial transparansi berpengaruh signifikan terhadap kinerja anggaran berkonsep value for money, Secara parsial pengawasan berpengaruh signifikan terhadap kinerja anggaran berkonsep value for money, Secara simultan akuntabilitas, transparansi dan pengawasan berpengaruh signifikan terhadap kinerja anggaran berkonsep value for

⁵¹Deli Wany Adlinana, *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep Value for Money Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhan Batu Selatan*, (Medan: Skripsi, Universitas Sumatera Utara, 2016).

				money pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan
3.	Defia Rizky Pane (2017) ⁵²	Analisis <i>Value for Money</i> Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Medan Tahun 2011-2015	Kualitatif deskriptif	Dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Medan masih tergolong belum sepenuhnya baik, karena indikator pengukurannya yaitu dari rasio ekonomis masih kurang ekonomis, rasio efisiensi tergolong kurang efisien, dan rasio efektivitas masih kurang efektif.

Persamaan penelitian Suryaningsih Loi (Skripsi) dengan penelitian ini adalah penelitian Loi (2015) menggunakan rumus rasio yang sama yakni rasio Value for Money dan melakukan penelitian di Kota Medan. Perbedaan dengan penelitian ini adalah jenis penelitian Loi (2015) menggunakan asosiatif kausal yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan sebab akibat. Asosiatif kausal yaitu jika variabel dependen dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen tertentu, maka dapat dinyatakan bahwa variabel X menyebabkan variabel Y Jadi disini ada variabel independen (variabel yang mempengaruhi) dan variabel dependen (variabel yang dipengaruhi). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan membuktikan

⁵²Defia Rizky Pane, *Analisis Value for Money Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Medan Tahun 2011-2015*, (Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2017)

hubungan Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi sebagai variabel independen terhadap Kinerja Anggaran berkonsep *Value For Money* sebagai variabel dependen. Loi (2015) juga menggunakan menggunakan metode analisis regresi linier berganda untuk menganalisa data yang dimiliki.

Persamaan penelitian Deli Wany Adliana (Skripsi) dengan penelitian ini adalah penelitian Adliana (2016) menggunakan rumus rasio yang sama yakni rasio *Value for Money*. Perbedaan dengan penelitian ini adalah jenis penelitian Adliana (2016) menggunakan asosiatif kausal yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan sebab akibat. Asosiatif kausal yaitu jika variabel dependen dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen tertentu, maka dapat dinyatakan bahwa variabel X menyebabkan variabel Y Jadi disini ada variabel independen (variabel yang mempengaruhi) dan variabel dependen (variabel yang dipengaruhi). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan membuktikan hubungan Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi sebagai variabel independen terhadap Kinerja Anggaran berkonsep *Value For Money* sebagai variabel dependen. Adliana (2016) juga menggunakan menggunakan metode analisis regresi linier berganda untuk menganalisa data yang dimiliki, dan Penelitian Adliana (2016) dilaksanakan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Persamaan penelitian Defia Rizki Pane (Skripsi) dengan penelitian ini adalah penelitian Kurnia (2017) menggunakan rumus rasio yang sama yakni rasio *Value for Money*, dan metode penelitian yang sama yaitu kualitatif deskriptif. Perbedaan dengan penelitian ini adalah meneliti kinerja keuangan anggaran pemerintah kota Medan untuk tahun 2011-2015.

C. Kerangka Berpikir

Value for Money merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah. Kinerja pemerintah tidak dapat dinilai dari output yang dihasilkan saja, akan tetapi harus mempertimbangkan input, output, dan outcome secara bersama-sama. Bahkan untuk beberapa hal perlu ditambahkan pengukuran distribusi dan

cakupan layanan (*equity and service coverage*). Tujuan *value for money* adalah untuk meningkatkan akuntabilitas lembaga sektor publik dan memperbaiki kinerja pemerintah⁵³.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Untuk mengukur tingkat kinerja dari Pemerintah Kota Medan dapat dilakukan berdasarkan konsep *Value for Money*, dengan menggunakan konsep ini, Pemerintah Kota Medan dapat memperhitungkan seberapa besar pendapatan asli daerah yang berdasarkan dari jumlah pajak daerahnya yang dapat dinilai dari tingkat ekonomi, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan suatu kegiatan

Berdasarkan dari Permendagri No. 13 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa untuk Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dapat disebutkan bahwa untuk struktur APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan.

Ekonomi adalah mengukur tingkat kehematan dari pengeluaran yang dilakukan organisasi sektor publik, dimana pengukuran tersebut memerlukan data anggaran pengeluaran dan realisasinya. Semakin besar persentase ekonomis maka kinerja keuangan pemerintah daerah semakin baik.

Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara input (masukan) dan output (hasil antara keuntungan dengan sumber-sumber yang dipergunakan). Semakin kecil persentase efisiensi maka kinerja keuangan pemerintah daerah semakin baik.

Efektivitas adalah tingkat keberhasilan suatu program dengan target yang telah ditetapkan. Jika suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan efektif. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.⁵⁴

⁵³ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, 2009, h. 21.

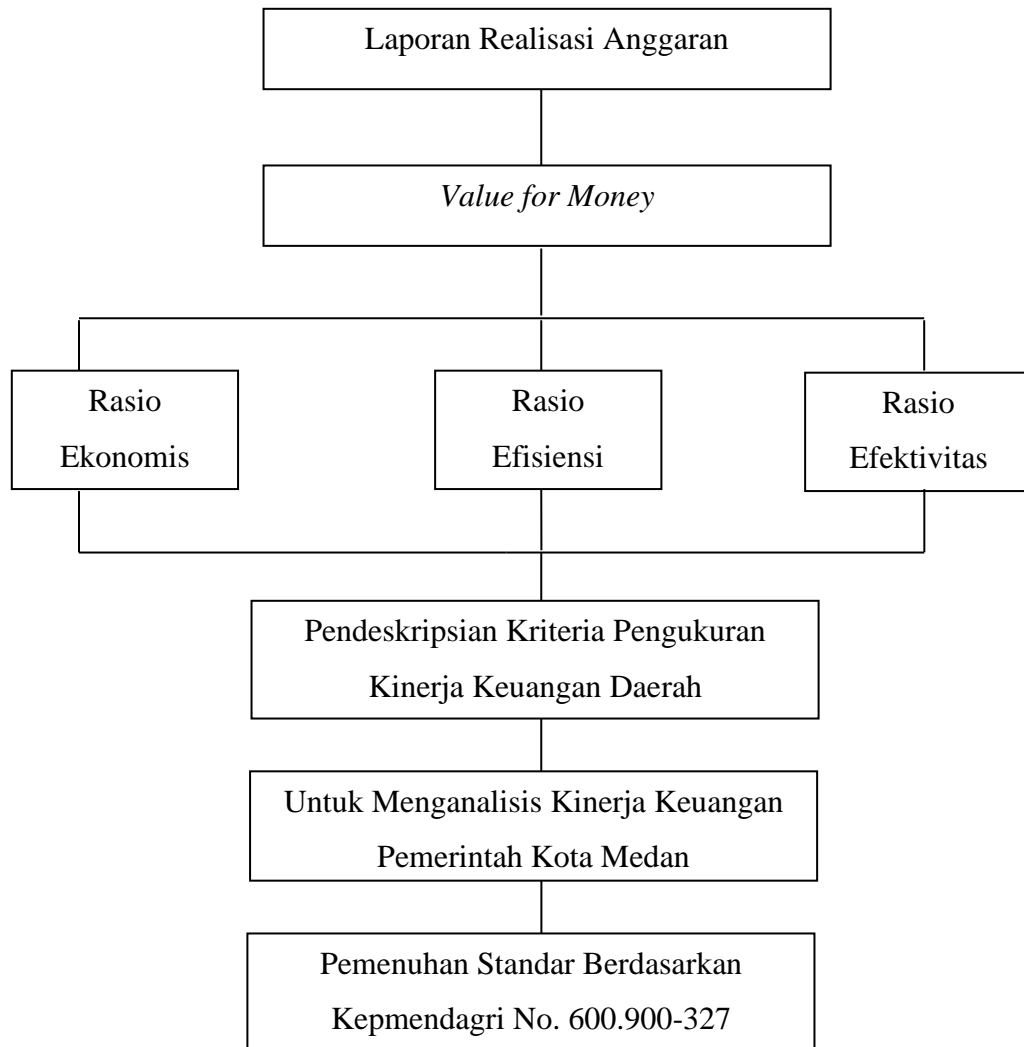
⁵⁴ Ibid, h. 134.

Mahsun menyatakan “fungsi rasio ekonomi adalah mengukur tingkat kehematan dari pengeluaran organisasi sektor publik”.⁵⁵ Rasio yang menggambarkan perbandingan biaya dengan realisasi pendapatan menunjukkan rasio efisiensi. Perbandingan kemampuan pemerintah daerah merealisasikan PAD dibanding dengan target yang ditetapkan menunjukkan rasio efektivitas.⁵⁶

Hasil perhitungan rasio ekonomis, efisiensi, serta efektivitas tersebut dapat menggambarkan kinerja keuangan yang dapat diukur value for money dalam pendapatan dan belanja daerah kota medan yang dapat dilihat dalam kerangka berpikir dibawah ini:

⁵⁵Muhammad Mahsun, *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*, h. 179.

⁵⁶Abdul Halim, *Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah*, h. 93.



Gambar 2.2 Kerangka Berpikir

Kemampuan pemerintah daerah khususnya Pemerintah Kota Medan dalam mengelola keuangan termuat dalam Laporan Realisasi Anggaran yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengalokasi dan pemakaian sumber daya keuangan. Laporan realisasi anggaran adalah laporan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam suatu periode pelaporan. Keberhasilan otonomi daerah tidak lepas dari kinerja pemerintah dalam mengelola keuangan daerahnya. Ukuran kinerja pemerintah berdasarkan anggaran berbasis kinerja dapat diukur dengan menggunakan

konsep *Value for Money*. *Value for Money* adalah konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang berdasarkan pada tiga elemen utama yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Untuk mengukur *Value for Money* menggunakan rasio ekonomis, rasio efisiensi, dan rasio efektivitas. Rasio ekonomi adalah pengukuran yang dilakukan dengan membandingkan antara input dan output value. Input dalam hal ini adalah target anggaran, sedangkan output value adalah realisasi anggaran. Suatu kinerja dikatakan ekonomis apabila realisasi anggaran lebih kecil daripada target anggaran dan dapat mencapai output sesuai dengan yang telah ditetapkan. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan. Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya. Pengukuran efektivitas merupakan perbandingan antara outcome dengan output. Suatu organisasi sektor public dapat dikatakan efektif apabila organisasi tersebut dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dengan metode *Value for Money* dijadikan sebagai indikator dalam pengukuran kinerja, sehingga dapat diketahui dan dianalisis tingkat kinerja yang ditinjau dari sisi ekonomis, efisiensi, dan efektivitas yang telah dicapai oleh Pemerintah Kota Medan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, penelitian yang merupakan data yang diperoleh disusun sedemikian rupa kemudian dianalisis berdasarkan teori-teori yang relevan dengan permasalahan untuk mengambil kesimpulan dan saran.⁵⁷

Penelitian kualitatif adalah prosedur yang menghasilkan data-data deskriptif yang meliputi kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang memahami objek penelitian yang sedang dilakukan yang dapat didukung dengan studi literatur berdasarkan pemahaman kajian pustaka, baik berupa data penelitian maupun angka yang dapat dipahami dengan baik.⁵⁸ Penelitian deskriptif dapat diartikan sebagai penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lainnya.

Teori dalam kualitatif menyatakan variabel mana yang penting atau bukan, bagaimana semua variabel berhubungan. Hubungan yang dijelaskan dengan teori kualitatif mungkin dikuantitatif, jika demikian, kuantitas akan diukur bukan pada yang lebih tinggi dibandingkan dengan skala ordinal (seperti diranking).⁵⁹

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kondisi dari kinerja keuangan Kota Medan jika dilihat atau dinilai menggunakan Rasio *Value for Money* dengan mengumpulkan dan menyajikan data yang diterima dari Pemerintah Kota Medan berupa data-data jumlah anggaran pendapatan dan belanja daerah, realisasi pendapatan dan belanja daerah kota medan sehingga memberikan gambaran yang cukup jelas untuk penulis menganalisis serta membandingkan dengan teori yang ada.

⁵⁷Husein Umar, *Metodelogi Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 142.

⁵⁸Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakary, 2006), h. 100

⁵⁹Arfan Ikhsan dan Misri, *Metodelogi Penelitian untuk Manajemen, Akuntansi dan Bisnis*, (Bandung: Ciptapustaka Media Perintis, 2012) h. 51.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan pada Kantor Pemerintahan Kota Medan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang beralamat di Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 Medan 20112 Provinsi Sumatera Utara.

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian ini dimulai pada bulan 06 Maret 2020 sampai dengan 06 April 2020.

C. Subjek dan Objek

1. Subjek

Subjek adalah target populasi yang memiliki karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Subjek penelitian atau responden adalah orang yang diminta untuk memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat.⁶⁰ Subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti. Jadi, subjek penelitian itu merupakan sumber informasi yang digali untuk mengungkap fakta-fakta di lapangan. Subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Anggaran (Syahrial Rangkuti), Anggota/Staf bidang anggaran (Nina Anggina Lubis), Anggota/Staf sub bidang pendapatan (Erlina Riz).

Tabel 3.1
Data Subjek Penelitian

No.	Nama	Jabatan	Bidang
1	Syahrial Rangkuti	Kepala Bidang	Anggaran
2	Nina Anggina Lubis	Anggota/Staf	Anggaran
3	Erlina Riz	Anggota/Staf	Sub bidang pendapatan

⁶⁰Arikunto, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006). h. 145.

2. Objek

Objek penelitian adalah himpunan elemen yang dapat berupa orang, organisasi atau barang yang akan diteliti.⁶¹ Objek penelitian merupakan permasalahan yang diteliti. Objek penelitian merupakan sesuatu yang menjadi perhatian dalam sebuah penelitian karena objek penelitian merupakan sasaran yang hendak dicapai untuk mendapatkan jawaban maupun solusi dari permasalahan yang terjadi. Objek pada penelitian ini adalah Laporan Realisasi APBD Kota Medan tahun 2014-2018.

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data penelitian yang didapat secara langsung dari sumber asli dan tidak melalui perantara. Data primer merupakan sumber utama untuk memperoleh jawaban atas penelitian yang diajukan dalam penelitian ini. berupa data kualitatif yakni. Data primer dalam penelitian ini berupa wawancara dan juga berupa gambaran umum dari Pemerintah Kota Medan dan gambaran umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan yang bersumber dari website pemukomedan.go.id dan data yang diambil langsung dari objek penelitian yaitu hasil dari wawancara dengan pihak-pihak yang terkait di Kantor Walikota Medan.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data primer sesudah diolah dan data yang bersumber dari laporan yang telah dibuat oleh pihak lain. Data sekunder yaitu data-data yang berasal dari perusahaan yang berupa bukti, laporan historis yang tersusun dalam arsip dan hal-hal yang berkenaan materi pembahasan

⁶¹Supranto, *Metode Riset : Aplikasinya dalam Pemasaran*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2000), h.21

skripsi. Data sekunder dalam penelitian ini berupa data kuantitatif berupa Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah kota Medan tahun 2014-2018.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.⁶²

Teknik yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah pengamatan langsung, wawancara, dan studi dokumentasi. Untuk mendapatkan kelengkapan informasi yang sesuai dengan fokus penelitian maka yang dijadikan teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Teknik Wawancara, yaitu dengan cara melakukan tanya jawab atau wawancara langsung dengan bagian-bagian yang berwenang dan pegawai yang terlibat didalam perusahaan. Dalam penelitian ini, yang ingin diwawancarai terdiri dari 3 orang yaitu Kepala Bidang Anggaran (Syahrial Rangkuti), Anggota/Staf Bidang Anggaran (Nina Anggina Lubis), Anggota/Staf Sub Bidang Pendapatan (Erlina Riz).
2. Teknik Dokumentasi, yaitu serangkaian informasi dan dokumen yang berupa laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah pada Pemerintah Kota Medan tahun 2014-2018.

F. Teknik Analisis Data

Analisa data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, member kode atau tanda. Analisa data yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian adalah teknik analisis deskriptif kualitatif dengan melalui beberapa tahapan terhadap dokumen terdahulu.

Pada tahap awal penelitian ini dilakukan pengumpulan data sampel melalui sumber data berupa dokumen laporan keuangan, kemudian data tersebut diolah dan dihitung dengan menggunakan rasio guna mendapatkan gambaran mengenai kondisi

⁶²Arfan Ikhsan Dan Imam Ghozali, *Metode Penelitian Untuk Akuntansi Dan Manajemen*, (Medan: PT. Madju Medan Cipta, Cet Ke-1, 2006), h. 106.

kinerja keuangan. Hasil perhitungan rasio yang sudah diperoleh kemudian disusun dalam bentuk analisis deskriptif guna menjelaskan makna dari angka-angka yang diperoleh dari hasil perhitungan tersebut.

Dalam hal ini, data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode rasio *Value for Money* dengan membandingkan hasil dari perhitungan rasio terhadap Laporan keuangan Pemerintah kota Medan dari tahun ke tahun. Adapun tolak ukur yang dapat digunakan dalam teknik analisis ini adalah:

1. Pengukuran Ekonomi

Pengukuran ekonomi memiliki pengertian bahwa dalam memperoleh sumber daya (input) sebaiknya dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang lebih rendah (*spending less*) atau harga yang mendekati harga pasar.

$$\text{Ekonomi} = \frac{\text{Realisasi Biaya Untuk Memperoleh Pendapatan}}{\text{Anggaran Biaya Untuk Memperoleh Pendapatan}} \times 100 \%$$

Tabel 3.2
Klasifikasi Pengukuran Ekonomis

Persentase	Kriteria
100% Keatas	Sangat Ekonomis
90%-100%	Ekonomis
80%-90%	Cukup Ekonomis
60%-80%	Kurang Ekonomis
Kurang dari 60%	Tidak Ekonomis

Sumber: Kepmendagri No.600.900-327 Tahun 1996

2. Pengukuran Efisiensi

Efisiensi merupakan pencapaian output yang maksimal dengan input tertentu atau penggunaan input yang rendah untuk mencapai output tertentu.

Pengukuran efisiensi dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Biaya Untuk Memperoleh Pendapatan}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100 \%$$

Tabel 3.3
Klasifikasi Pengukuran Efisiensi

Persentase	Kriteria
100% Keatas	Tidak Efisien
90%-100%	Kurang Efisien
80%-90%	Cukup Efisien
60%-80%	Efisien
Kurang dari 60%	Sangat Efisien

Sumber: Kepmendagri No.600.900-327 Tahun 1996

3. Pengukuran Efektivitas

Pengukuran efektivitas merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan.

Secara sistematis, efektivitas dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Target Pendapatan}} \times 100 \%$$

Tabel 3.4
Klasifikasi Pengukuran Efektivitas

Persentase	Kriteria
100% Keatas	Sangat Efektif
90%-100%	Efektif
80%-90%	Cukup Efektif
60%-80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber: Kepmendagri No.600.900-327 Tahun 1996

Langkah-langkah yang dibuat penulis dalam teknik analisis data ini adalah :

1. Collecting/Pengumpulan data, berkaitan dengan laporan realisasi anggaran Kota Medan yang diperoleh dari hasil observasi.
2. Reduksi data, yaitu memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian. Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada laporan realisasi anggaran instansi. Terlebih dahulu peneliti mengklarifikasi data realisasi dan anggaran yang telah diperoleh, kemudian mengolah serta menghubungkan semua data yang telah diperoleh dengan teori yang ada. Pengukuran kinerja keuangan ditinjau menggunakan metode value for money dengan menghitung rasio ekonomi, rasio efisiensi, dan rasio efektivitas anggaran pendapatan dengan menggunakan data yang diperoleh.
3. Penyajian data, sekumpulan informasi yang telah tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data berupa analisis dalam bentuk uraian singkat, sehingga peneliti dapat menguasai data. Penyajian data ini dilakukan dengan evaluasi kinerja keuangan berdasarkan laporan realisasi dan anggaran yang telah dianalisis.
4. Penarikan kesimpulan, melakukan simpulan dari hasil penelitian yang dilakukan mengenai Value for Money dalam pengukuran kinerja keuangan.

BAB IV

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Data Umum

1. Gambaran Umum Pemerintah Kota Medan

Pemerintah Kota Medan yang merupakan salah satu bagian dari Provinsi Sumatera Utara yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengelola sumber pendapatan daerahnya sendiri. Untuk kelangsungan dan kemajuan dari Kota Medan maka diharapkan Kota Medan mampu menggali, mengelola, dan memaksimalkan potensi sumber daya yang ada di Kota Medan. Dengan terus menggali, mengelola dan memaksimalkan potensi sumber daya yang ada di Kota Medan, maka nantinya akan mampu meningkatkan pajak daerah, sehingga mampu memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah.

Secara geografis, Kota Medan memiliki kedudukan strategis sebab berbatasan langsung dengan Selat Malaka dibagian Utara, sehingga relatif dekat dengan kota-kota/negara yang lebih maju seperti Pulau Penang Malaysia, Singapura dan lain-lain. Demikian juga secara demografis Kota Medan diperkirakan memiliki pangsa pasar barang dan jasa yang relatif besar dimana tahun 2007 telah mencapai 2.083.156 jiwa. Demikian juga secara ekonomis dengan struktur ekonomi yang didominasi sektor tertier dan sekunder, Kota Medan sangat potensial berkembang menjadi pusat perdagangan dan keuangan regional Nasional.

a. Geografi dan Demografi

Karakteristik Kota Medan didukung oleh luas wilayah 265,10 km² atau 3,6 persen dari total luas wilayah Provinsi Sumatera Utara. Secara administratif, Kota Medan berbatasan dengan Selat Malaka di sebelah utara, dan berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang di sebelah timur, barat, serta selatan. Kota Medan sebagai pusat pemerintahan Provinsi Sumatera Utara

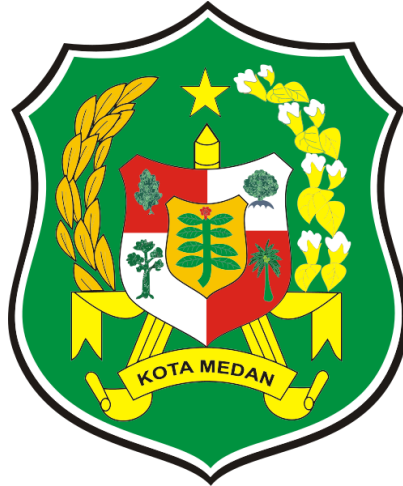
memiliki posisi strategis yang semakin menguat baik secara regional maupun nasional. Posisi ini menjadi modal dasar dalam pembangunan kota.

Kota Medan, sebagai salah satu pusat perekonomian regional terpenting di pulau Sumatera dan salah satu dari tiga kota metropolitan baru di Indonesia, memiliki kedudukan, fungsi dan peranan strategis sebagai pintu gerbang utama bagi kegiatan jasa perdagangan dan keuangan secara regional/internasional di kawasan barat Indonesia, yang didukung oleh ketersediaan Bandara Polonia dan Pelabuhan Laut Belawan serta infrastruktur dan utilitas kota lainnya.

Kota Medan secara administratif pemerintahan saat ini terdiri dari 21 Kecamatan dengan 151 Kelurahan, yang terbagi atas 2.001 lingkungan. Berdasarkan batas wilayah administratif, Kota Medan relatif kecil dibanding kota lainnya, tetapi posisi secara ekonomi regional Kota Medan sangat penting karena berada dalam wilayah hinterland dengan basis ekonomi sumber daya alam yang relatif besar dan beragam, serta dukungan kepelabuhanan.

Dibanding kota besar lainnya, Kota Medan memiliki keterbatasan ruang sebagai akibat bentuk wilayah administratif yang ramping ditengah. Dengan keterbatasan ruang tersebut, daya dukung lingkungan perkotaan menjadi kurang optimal terutama hambatan alamiah dalam pengembangan wilayah utara Kota Medan, khususnya dalam penyediaan prasarana dan sarana perkotaan. Kondisi tersebut juga menyebabkan cenderung kurang seimbang dan kurang terpadunya penataan ruang kota di bagian utara dan bagian selatan.

b. Lambang Kota Medan



Gambar 4.1
Lambang Kota Medan

Makna dari lambang Kota Medan di atas adalah sebagai berikut:

1. 17 biji padi berarti tanggal 17 dari hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.
2. 8 bunga kapas berarti bulan 8 dari tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.
3. 4 tiang dan 5 bahagian dari perisai berarti tahun 45 dari Proklamasi Indonesia.
4. Satu bambu runcing yang terletak dibelakang perisai adalah lambang perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia, dan lima bahan-bahan pokok yang terpenting dihadapan bambu runcing berarti Kemakmuran serta Keadilan Sosial yang merata ada dihadapan kita.
5. Bintang yang bersinar lima adalah Bintang Nasional yang berarti bahwa hidup penduduk Kota Medan khususnya dan Indonesia umumnya akan bersinar-sinar bahagia dan lepas dari kemiskinan dan kemelaratan.

6. Lima sinar bintang berarti lima bahan pokok terpenting yang diekspor dari Kota Medan dan lima bahagian perisasi berarti Pancasila yang menjadi Dasar Negara Republik Indonesia.

c. Visi dan Misi

Visi Kota Medan adalah **"Menjadi Kota Masa Depan yang Multikultural, Berdaya Saing, Humanis, Sejahtera dan Religius"**.

Misi Kota Medan adalah sebagai berikut:

1. Kerjasama

Menumbuhkembangkan stabilitas, kemitraan, partisipasi dan kebersamaan dari seluruh pemangku kepentingan pembangunan kota.

2. Kreatifitas dan Inovasi

Meningkatkan efisiensi melalui deregulasi dan debirokratisasi sekaligus penciptaan iklim investasi yang semakin kondusif termasuk pengembangan kreatifitas dan inovasi daerah guna meningkatkan kemampuan kompetitif serta komparatif daerah.

3. Kebhinekaan

Mengembangkan kepribadian masyarakat kota bersarakan etika dan moralitas keberagaman agama dalam bingkai kebhinekaan.

4. Penanggulangan Kemiskinan

Meningkatkan percepatan dan perluasan program penanggulangan kemiskinan.

5. Multikulturalisme

Menumbuhkembangkan harmonisasi, kerukunan, solidaritas, perstuan dan kesatuan serta keutuhan sosial, berdasarkan kebudayaan daerah dan identitas lokal multikulturalisme.

6. Tata ruang kota yang konsisten

Menyelenggarakan tata ruang kota yang konsisten serta didukung oleh ketersediaan infrastruktur dan utilitas kota yang semakin modern dan berkelanjutan.

7. Peningkatan Kesempatan Kerja

Mendorong peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat melalui peningkatan taraf pendidikan dan kesehatan masyarakat secara merata dan berkeadilan.

8. Smart City

Mengembangkan Medan sebagai *Smart City*.

2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan

a. Sejarah Singkat

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dahulu masih berupa unit kerja yang kecil yaitu bagian keuangan sekretariat daerah kota Medan dengan tugas pokoknya mengelola keuangan pemerintah kota Medan. Mengingat pada saat itu potensi tugas pengelolaan keuangan pemerintah kota Medan belum begitu kompleks maka bagian keuangan kota Medan terdiri dari 5 sub bagian yaitu anggaran, perbendaharaan, gaji, verifikasi, dan pembukuan.

Dengan peningkatan perkembangan pembangunan dan laju pertumbuhan penduduk kota Medan, maka melalui peraturan daerah Kota Medan No. 2 Tahun 2011 tentang perubahan Atas Perda No. 3 tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan, bagian keuangan sekretariat daerah kota Medan yang terdiri dari 5 bagian tersebut ditingkatkan menjadi badan pengelola daerah keuangan yang tugas pokoknya mengelola keuangan pemerintah Kota Medan.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan yang mampu sebagai konteks pelayanan publik dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Pengembangan dan peningkatan pengelolaan keuangan daerah yang bertujuan penataan organisasi perangkat

daerah yang profesional dan berkualitas dalam sistem dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai sarana pengembangan dan peningkatan pengelolaan keuangan daerah. Penataan organisasi perangkat daerah yang profesional guna pengawasan dan akuntabilitas, kualitas serta penyusunan pelaporan dan pengelolaan keuangan daerah.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan berkeinginan agar setiap Aparatur Pemerintah Kota Medan berkemampuan melaksanakan tugasnya dengan baik, berdayaguna dan berhasilguna yang didukung dengan Kelembagaan Perangkat Daerah yang efektif dan efisien sehingga dapat terwujud pelayanan Pemerintah Kota Medan yang prima sesuai dengan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan serta standar operasional dan prosedur (SOP).

Organisasi BPKAD, terdiri dari:

- A. Badan
- B. Sekretariat, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Penyusunan Program.
- C. Bidang Anggaran, membawahkan:
 - a. Sub Bidang Pendapatan;
 - b. Sub Bidang Belanja Tidak Langsung;
 - c. Sub Bidang Belanja Langsung.
- D. Bidang Perbendaharaan, membawahkan:
 - a. Sub Bidang Gaji;
 - b. Sub Bidang Belanja;
 - c. Sub Bidang Verifikasi dan Kas
- E. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, membawahkan:
 - a. Sub Bidang Akuntansi;
 - b. Sub Bidang Pelaporan.

F. Unit Pelaksana Teknis (UPT);

G. Kelompok Jabatan Fungsional.

Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) berdiri pada tanggal 28 Desember 2011. Visi dan Misi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah diterapkan mulai 2011-2015.

Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan berkeinginan agar setiap Aparatur Pemerintah Kota Medan berkemampuan melaksanakan tugasnya dengan baik, berdayaguna dan berhasilguna yang didukung dengan Kelembagaan Perangkat Daerah yang efektif dan efisien sehingga dapat terwujud pelayanan Pemerintah Kota Medan yang prima sesuai dengan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan serta standar operasional dan prosedur (SOP). Sejalan dengan Visi dan Misi Kota Medan, maka Visi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan Tahun 2011-2015 sebagai berikut :

“ TERWUJUDNYA SUMBER DAYA APARATUR PEMERINTAH KOTA MEDAN YANG PROFESIONAL, BERWAWASAN MANAJEMEN PENGELOLAAN KEUANGAN YANG SISTEMATIS, EFISIEN DAN EFEKTIF ”

Rasionalitas Visi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan sebagaimana di atas adalah sebagai berikut :

a. Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang profesional.

Pelayanan administrasi yang profesional sebagai unsur yang utama dalam menjalankan fungsi pemerintah dalam pengaturan/regulasi maupun fungsi Pelayanan, maka profesionalisme aparatur sangat memegang peranan dalam rangka menumbuh kembangkan pembangunan masyarakat, khususnya untuk menjawab permasalahan dan peluang pada era globalisasi sekarang ini.

Untuk memungkinkan Pemerintah Kota Medan mampu mengambil bagian dalam proses globalisasi yang telah terjadi pada seluruh aspek kehidupan manusia, salah satu faktor penting yang harus dimiliki oleh Pemerintah Kota Medan adalah sumber daya aparatur yang profesional dengan meningkatkan mutu pelayanan administrasi.

b. Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kota Medan yang berwawasan manajemen pengelolaan keuangan.

Sumber daya aparatur yang profesional dimaksud adalah sumber daya aparatur yang memiliki intelektualitas dan kompetensi dalam hal merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan proses pembangunan Kota Medan sekaligus dapat segera merespon tuntutan dan harapan masyarakat. Hal ini akan berimplikasi pada terbentuknya sumber daya aparatur yang bersih, berwibawa, bermoral yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan budaya. Faktor-faktor tersebut akan berkembang sejalan dengan aparatur Kota Medan yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi dan spesialisasi sesuai bidang tugasnya untuk menciptakan kualitas sumber daya aparatur serta peningkatan pengetahuan bagi aparaturnya sehingga akan memungkinkan Pemerintah dan masyarakat Kota Medan mampu mencapai keberhasilan pembangunan Kota sebagaimana Visi dan Misi Kota Medan yaitu ” **Medan Kota yang berdaya saing, nyaman, peduli dan sejahtera**”.

c. Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kota Medan Yang Berpengabdian.

Bahwa pada era globalisasi sekarang semakin terasa luasnya cakupan pembangunan yang harus dilaksanakan. Namun demikian dalam proses pembangunan untuk melayani semua kebutuhan tersebut hanya dapat kita lakukan secara bertahap. Dalam pembangunan dan pembinaan sumber daya aparatur khususnya dan masyarakat pada umumnya juga dilaksanakan dalam kerangka membangun persatuan dan kesatuan Bangsa.

Oleh karena itu profesionalisme sumber daya aparatur yang akan diwujudkan tersebut tidak semata hanya membangun kualitas, kompetensi, menguasai ilmu dan teknologi tetapi juga sangat penting memiliki integritas dan rasa pengabdian untuk membangun bangsa dan negara melalui pembangunan daerahnya, dengan demikian perbedaan kecepatan pencapaian kemajuan pembangunan antar daerah menjadi sebuah tantangan dan masukan untuk perbaikan kebijakan dan kinerja ke arah yang lebih baik ke depan sehingga penerapan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan dibidang pengelolaan keuangan daerah dan meningkatnya kualitas pelayanan aparatur.

d. Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Bahwa dalam rangka pencapaian sistem pelaporan kinerja dan keuangan diperlukan pembinaan sumber daya aparatur yang mampu berdaya guna untuk menunjang peningkatan sistem capaian kinerja. Oleh karena peningkatan capaian kinerja dan keuangan bermuara dari kualitas sumber daya aparatur yang kompetensi, menguasai perkembangan ilmu dan teknologi tetapi juga sangat penting memiliki integritas dan rasa pengabdian untuk membangun bangsa dan negara melalui pembangunan daerahnya, dengan demikian perbedaan kecepatan pencapaian kemajuan pembangunan antar daerah menjadi sebuah tantangan dan masukan untuk perbaikan kebijakan dan kinerja ke arah yang lebih baik. Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan sehingga dapat meningkatnya kualitas dan sistem pelaporan.

e. Pengembangan dan Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan yang mampu sebagai konteks pelayanan publik dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good govermance*). Pengembangan dan peningkatan pengelolaan keuangan daerah yang bertujuan penataan organisasi perangkat daerah yang profesional dan berkualitas dalam sistem

dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai sarana pengembangan dan peningkatan pengelolaan keuangan daerah. Penataan organisasi perangkat daerah yang profesional guna pengawasan dan akuntabilitas, kualitas serta penyusunan pelaporan dan pengelolaan keuangan daerah.

Misi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pihak-pihak lain yang berkepentingan agar harapan yang dicita-citakan pada masa mendatang akan tercapai yaitu:

1. Meningkatkan transparansi, efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah Kota Medan.
2. Meningkatkan sistem pengelolaan keuangan daerah melalui teknologi yang lebih baik.
3. Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kota Medan.

Dalam mencapai visi organisasi, Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan merumuskan misi organisasi sebagai tugas utama yang harus dilakukan dalam mencapai tujuan organisasi dalam kurun waktu tertentu.

Ketiga Misi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan di atas dapat dijelaskan dengan rasionalitas sebagai berikut :

1. Peningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Pelayanan Aparatur Pemerintah Kota Medan.

Dengan terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana administrasi perkantoran merupakan penunjang kelancaran tugas – tugas pelayanan bagi aparatur sebagai aparatur Pemerintah Kota Medan yang berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan sumber daya manusia (SDM) maka pelayanan administrasi dan aparatur dapat berjalan sesuai program dan

rencana kerja yang telah disusun dan dapat menerapkan mutu pelayanan administrasi serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

2. Meningkatkan transparansi, efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah Kota Medan.

Pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan harus memiliki manfaat tepat guna yang berbasis kinerja sehingga dapat terlihat dari hasil pekerjaan yang dilakukan sehingga aparatur pemerintah semakin memiliki pengetahuan, keahlian, keterampilan, maupun pengalaman yang sesuai dengan ruang lingkup wewenang dan tanggung jawab yang diemban sesuai prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan khususnya bidang pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas transparan, efisien dan efektif.

3. Meningkatkan sistem pengelolaan keuangan daerah melalui teknologi yang lebih baik.

Terkait dengan salah satu tujuan organisasi Pemerintah Kota Medan untuk meningkatkan kualitas, kuantitas, dan pemerataan pelayanan umum Pemerintah Kota Medan kepada masyarakat dengan pelayanan yang prima, terjangkau dan adil, maka disadari bahwa pada prakteknya, tujuan itu hanya dapat tercapai oleh sumber daya aparatur Pemerintah Kota Medan yang secara langsung berinteraksi dengan sistem teknologi yang harus diketahui oleh aparatur dan menyadari tugas pelayanan yang harus dilakukannya. Oleh karenanya motivasi, disiplin dan kualitas sumber daya aparatur sangat dibutuhkan guna mendukung penerapan penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah yang baik.

4. Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kota Medan.

Bahwa untuk dapat tercapainya tujuan organisasi Kinerja organisasi akan selalu ditentukan oleh kinerja sumber daya manusia dalam organisasi yang bersangkutan disamping adanya peran penting faktor-

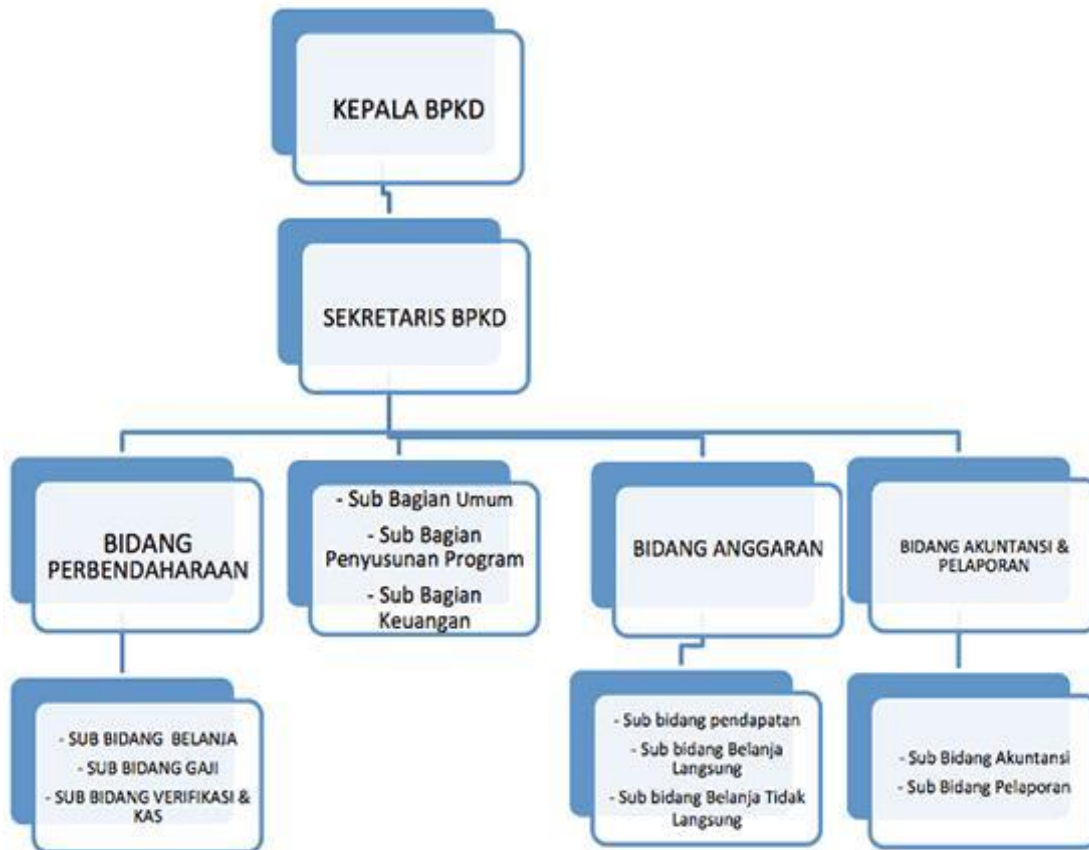
faktor lain. Oleh karena itu, peningkatan kinerja sumber daya aparatur Pemerintah Kota Medan mutlak harus dilakukan.

Dalam batasan Misi di atas, peningkatan kinerja aparatur dapat terlepas dari makna peningkatan produktifitas kerja aparatur Pemerintah Kota Medan sehingga terbebas dari pemborosan dan ketidakefisienan. Menempatkan aparatur pada suatu gugus kerja yang jelas, peningkatan karier dan kesejahteraan yang sesuai dengan prestasi aparatur, kepuasan kerja, budaya organisasi yang mendukung peningkatan kinerja dan sebagainya merupakan faktor-faktor yang secara simultan berkorelasi dalam proses peningkatan kinerja sumber daya aparatur Pemerintah Kota Medan.

b. Tugas Pokok dan Fungsi

BPKAD mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah lingkup anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan. Badan menyelenggarakan fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang PKD
- 2) Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis urusan pemerintah daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah (PKD)
- 3) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pengelolaan keuangan
- 4) Penyusunan dan penyelenggaraan administrasi keuangan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan daerah
- 5) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan daerah; dan
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Gambar 4.2
Bagan Organisasi BPKAD Kota Medan

B. Data Khusus

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014-2018.

Tabel 4.1
Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Medan
Tahun 2014
(dalam rupiah)

Uraian	2014	
	Anggaran	Realisasi
Pendapatan Daerah	4.560.412.529.543,87	4.042.115.828.231,62
Pendapatan Asli Daerah	1.678.116.623.125	1.384.246.114.729,62
Pendapatan Transfer	2.881.185.547.418,87	2.657.869.713.502
Lain-Lain Pendapatan yang Sah	1.110.359.000	0
Belanja	4.625.169.942.881	3.723.643.299.085,60
Belanja Operasi	3.579.613.342.151	2.939.241.615.113,97
Belanja Modal	1.038.556.600.730	783.883.177.721,63 1
Belanja Tak Terduga	7.000.000.000	518.506.250
Penerimaan Daerah	91.011.413.337,13	73.033.060.944,24
Pengeluaran Daerah	26.254.000.000	20.784.820.138,71 1
Pembiayaan Bersih	64.757.413.337,13	52.248.240.805,53
SILPA	0	370.720.769.951,55

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Tabel 4.2
Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Medan
Tahun 2015
(dalam rupiah)

Uraian	2015	
	Anggaran	Realisasi
Pendapatan Daerah	5.046.111.839.162,45	4.259.044.490.715,42
Pendapatan Asli Daerah	1.794.704.774.012,45	1.489.723.189.088,42
Pendapatan Transfer	3.243.256.160.750	2.769.321.301.627
Lain-Lain Pendapatan yang Sah	8.150.904.400	0
Belanja	5.467.952.757.114	4.374.968.274.136,94
Belanja Operasi	4.111.280.501.953	3.457.801.274.812,16
Belanja Modal	1.349.672.255.161	916.888.037.907,78
Belanja Tak Terduga	7.000.000.000	278.961.417
Penerimaan Daerah	436.840.917.951,55	370.720.769.951,55
Pengeluaran Daerah	15.000.000.000	2.221.380.000
Pembiayaan Bersih	421.840.917.951,55	368.499.389.951,55
SILPA	0	252.575.606.530,03

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Tabel 4.3
Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Medan
Tahun 2016
(dalam rupiah)

Uraian	2016	
	Anggaran	Realisasi
Pendapatan Daerah	5.490.162.683.364,97	4.308.116.916.024,91
Pendapatan Asli Daerah	1.884.851.580.562,97	1.535.309.574.014,91
Pendapatan Transfer	3.605.032.623.407	2.772.807.342.010
Lain-Lain Pendapatan yang Sah	278.479.395	0
Belanja	5.735.922.591.995	4.523.672.134.655,15
Belanja Operasi	4.413.092.921.342	3.584.201.617.240,59
Belanja Modal	1.306.656.265.903	936.599.131.961
Belanja Tak Terduga	1.815.697.900	1.559.196.340
Penerimaan Daerah	252.575.606.530,03	252.575.606.530,03
Pengeluaran Daerah	5.000.000.000	0
Pembiayaan Bersih	247.575.606.530,03 2	252.575.606.530,03
SILPA	0	35.461.191.559,79

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Tabel 4.4
Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Medan
Tahun 2017
(dalam rupiah)

Uraian	2017	
	Anggaran	Realisasi
Pendapatan Daerah	5.523.623.117.419	4.409.065.482.200,50
Pendapatan Asli Daerah	2.031.995.548.717,81	1.739.756.922.633,50
Pendapatan Transfer	3.491.627.568.702	2.669.308.559.567
Lain-Lain Pendapatan yang Sah	377.113.124.765,81	0
Belanja	5.546.733.964.019,40	4.394.045.824.264,53
Belanja Operasi	4.119.300.403.261,40	3.396.569.832.362,53
Belanja Modal	1.411.306.657.578,00	997.475.991.902
Belanja Tak Terduga	16.126.903.180,00	0
Penerimaan Daerah	35.461.191.560	35.461.191.560
Pengeluaran Daerah	5.000.000.000	5.000.000.000
Pembiayaan Bersih	30.461.191.560	30.461.191.560
SILPA	0	43.701.504.535,76

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Tabel 4.5
Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Medan
Tahun 2018
(dalam rupiah)

Uraian	2018	
	Anggaran	Realisasi
Pendapatan Daerah	5.239.408.011.116	4.253.618.758.533
Pendapatan Asli Daerah	2.112.663.059.116	1.636.204.514.684
Pendapatan Transfer	3.126.744.952.000	2.617.414.243.849
Lain-Lain Pendapatan yang Sah	338.521.559.116	227.027.490.855
Belanja	5.449.562.922.528	4.213.480.509.726,24
Belanja Operasi	4.274.124.864.704	3.455.113.095.305,68
Belanja Modal	1.168.438.057.824	753.996.886.210,7
Belanja Tak Terduga	7.000.000.000	4.370.538.210,49
Penerimaan Daerah	43.701.504.536,76	43.701.504.536,76
Pengeluaran Daerah	15.000.000.000	15.000.000.000
Pembiayaan Bersih	28.701.504.536	28.701.504.536
SILPA	(182.976.250.276,24)	67.316.909.942,05

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

C. Analisis Data dan Pembahasan

Pengukuran kinerja Pemerintah Daerah Kota Medandengan metode Value For Money yang diukur dengan menggunakan rasio ekonomis, rasio efisiensi dan rasio efektivitas pajak daerah, dimana penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Rasio Ekonomis

Ekonomi memiliki pengertian bahwa dalam memperoleh sumber daya sebaiknya dengan harga yang lebih rendah atau harga yang mendekati harga pasar. Suatu kinerja organisasi dikatakan ekonomis apabila realisasi anggaran lebih kecil daripada target anggaran dan dapat mencapai output yang maksimal. Perhitungan tersebut digunakan karena sulitnya mengkonversikan SDM dan sarana dan prasarana yang digunakan ke dalam satuan moneter dan menentukan berapa harga input yang sesungguhnya diperlukan.

Dengan semakin besar rasio ekonomis menunjukkan pemerintah mampu dalam memprediksi biaya atas pengeluaran, maka kinerja keuangan pemerintah daerah semakin baik.⁶³ Dalam penelitian ini pengukuran ekonomi dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Ekonomis} = \frac{\text{Realisasi Biaya Untuk Memperoleh Pendapatan}}{\text{Anggaran Biaya Untuk Memperoleh Pendapatan}} \times 100 \%$$

Ketentuan:

- 1) Jika > 100% maka Sangat Ekonomis
- 2) Jika 90%-100% maka Ekonomis
- 3) Jika 80%-90% maka Cukup Ekonomis
- 4) Jika 60%-80% maka Kurang Ekonomis
- 5) Jika < 60% maka Tidak Ekonomis

⁶³Muhammad Mahsun, *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*, h. 179.

Tabel 4.6
Rasio Ekonomis Pemerintah Kota Medan

Tahun	Realisasi Belanja Daerah	Anggaran Belanja Daerah	Rasio Ekonomi
2014	3.723.643.299.085,60	4.625.169.942.881	80,50%
2015	4.374.968.274.136,94	5.467.952.757.114	80%
2016	4.523.672.134.655,15	5.735.922.591.995	79%
2017	4.394.045.824.264,53	5.546.733.964.019	79%
2018	4.213.480.509.726,24	5.449.562.922.528	77,31%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran yang telah diolah

Dilihat dari tabel 4.6, maka untuk Rasio ekonomis Pemerintah Kota Medan yang diukur dalam 5 tahun, dimana :

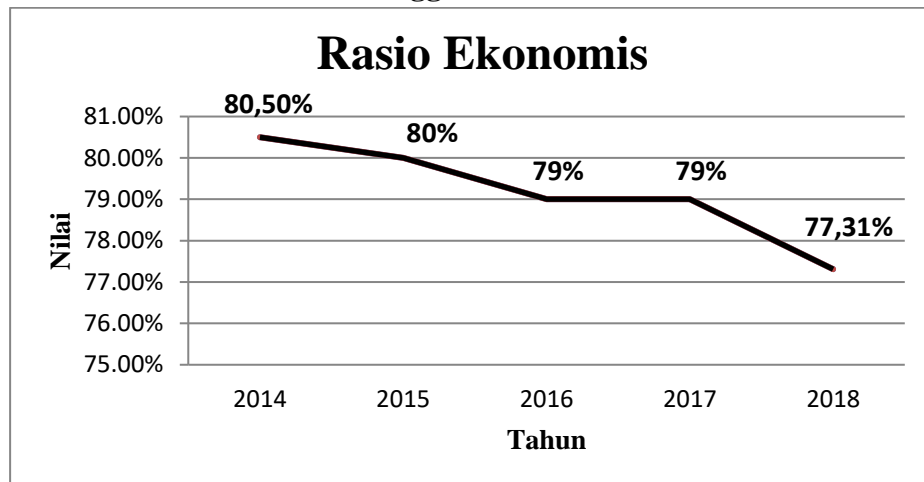
1. Untuk tahun 2014 rasio ekonomis sebesar 80,50%, termasuk dalam kategori cukup ekonomis karena berada diantara 80% sampai dengan 90%.
2. Untuk tahun 2015 rasio ekonomis mengalami penurunan menjadi 80%, dan termasuk dalam kategori kurang ekonomis karena berada diantara 60% sampai dengan 80%.
3. Untuk tahun 2016 rasio ekonomis sebesar 79% dan mengalami penurunan kembali, yang termasuk dalam kategori kurang ekonomis karena berada diantara 60% sampai dengan 80%.
4. Untuk tahun 2017 rasio ekonomis tetap sebesar 79%, yang mana masih termasuk dalam kategori kurang ekonomis karena berada diantara 60% sampai dengan 80%.
5. Di tahun 2018 rasio ekonomis kembali mengalami penurunan menjadi 77,31%, yang termasuk dalam kategori kurang ekonomis karena berada diantara 60% sampai dengan 80%. Dapat dikatakan, Rasio ekonomis yang paling rendah berada pada tahun 2018. Dimana standar dari rasio ekonomis yang seharusnya dicapai kota Medan yaitu >

100% masih belum bisa dicapai untuk tahun 2014-2018, dapat dikatakan bahwa Pemerintah Kota Medan belum dapat mengelola anggaran secara ekonomis.

Rasio ekonomis sering disebut penghematan yang mencakup pengelolaan secara cermat dan tidak ada pemborosan. Dengan semakin besar persentase ekonomis maka kinerja keuangan pemerintah daerah semakin baik.⁶⁴

Grafik pengukuran kinerja value for money untuk rasio efektivitas dari tahun anggaran 2014-2018 adalah sebagai berikut :

Grafik 4.1
Perkembangan Rasio Ekonomis Pemerintah Daerah Kota Medan
Tahun Anggaran 2014 – 2018



Sumber : Data diolah

Berdasarkan grafik 4.1 perkembangan rasio ekonomis menurun setiap tahunnya. Tahun anggaran 2014 sampai dengan 2015 mengalami penurunan sebesar 0,50% dan termasuk dalam kategori cukup ekonomis. Tahun 2015 sampai dengan 2016 mengalami penurunan sebesar 1% dan termasuk dalam kategori kurang ekonomis. Tahun anggaran 2017 grafik tidak mengalami

⁶⁴Muhammad Mahsun, *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*, h. 179.

kenaikan maupun penurunan dan masih berada dalam kategori kurang ekonomis. Tahun anggaran 2018 kembali mengalami penurunan yang signifikan sebesar 1,69%. Ini menunjukkan bahwa pemerintah kota Medan belum disiplin dalam menggunakan anggaran pada saat memulai pelaksanaan program pemerintah dan pada akhir masa pelaksanaannya. Program-program pemerintah banyak terjadi pemborosan pada penggunaan belanja operasi. Belanja operasi meliputi belanja pegawai, belanja barang jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan social, dan belanja bantuan keuangan. Tahun anggaran 2014 menjadi yang terbaik karena menghasilkan rasio ekonomis sebesar 80,50% dan dikatakan cukup ekonomis.

2. Rasio Efisiensi

Efisiensi merupakan pencapaian output yang maksimal dengan input tertentu atau penggunaan input yang rendah untuk mencapai output tertentu. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antar output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan. Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana seminimum mungkin. Efisiensi digunakan untuk menggambarkan perbandingan antara realisasi belanja dengan realisasi pendapatan

Kinerja pemerintah daerah Kota Medan dikatakan efisien apabila rasio yang dihasilkan atau dicapai adalah < 1 atau tidak lebih dari 100%. Semakin kecil nilai rasio efisiensi maka semakin baik kinerja pemerintah daerah Kota Medan.

Berikut diuraikan perhitungan rasio efisiensi berdasarkan rumus yang digunakan yaitu sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Biaya Untuk Memperoleh Pendapatan}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100 \%$$

Ketentuan:

- 1) Jika > 100% maka Tidak Efisien
- 2) Jika 90%-100% maka Kurang Efisien
- 3) Jika 80%-90% maka Cukup Efisien
- 4) Jika 60%-80% maka Efisien
- 5) Jika < 60% maka Sangat Efisien.

Tabel 4.7
Rasio Efisiensi Pemerintah Kota Medan

Tahun	Realisasi Belanja Daerah	Realisasi Pendapatan	Rasio Efisiensi
2014	3.723.643.299.085,60	4.042.115.828.231,62	92,12%
2015	4.374.968.274.136,94	4.259.044.490.715,42	102,72%
2016	4.523.672.134.655,15	4.308.116.916.024,91	105%
2017	4.394.045.824.264,53	4.409.065.482.201,50	99,69%
2018	4.213.480.509.726,24	4.253.618.758.533,00	99,05%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran yang telah diolah

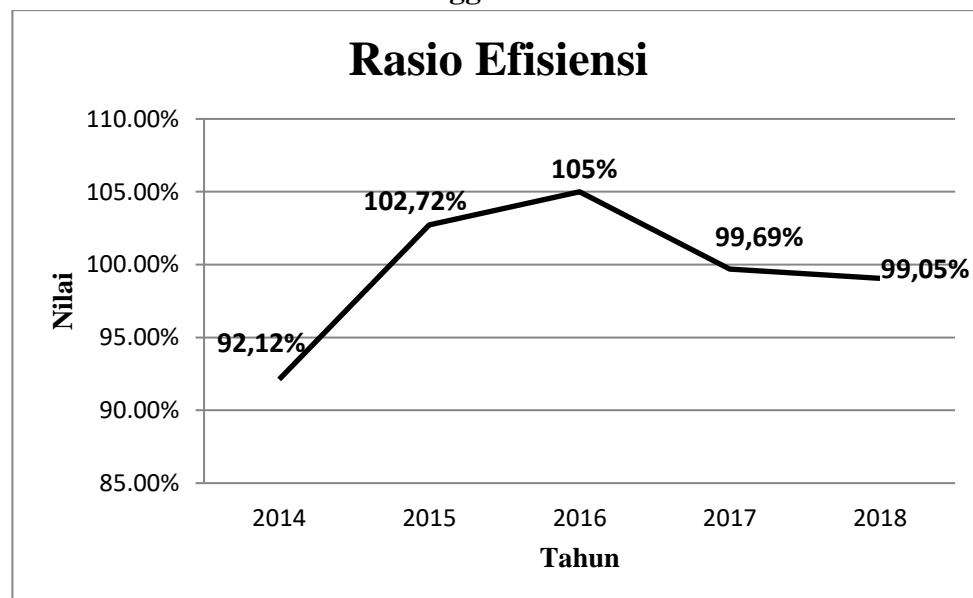
Dilihat dari tabel 4.7, maka untuk Rasio efisiensi Pemerintah Kota Medan yang diukur dalam 5 tahun, dimana :

1. Untuk tahun 2014 rasio efisiensi sebesar 92,12%, yang termasuk dalam kategori kurang efisien karena untuk tahun 2014 berada diantara 90% sampai dengan 100%.
2. Untuk tahun 2015 rasio efisiensi mengalami peningkatan menjadi 102,72%, termasuk dalam kategori tidak efisien karena berada diatas 100%.
3. Untuk tahun 2016 rasio efisiensi mengalami peningkatan menjadi 105%, yang termasuk dalam kategori tidak efisien karena berada diatas 100%.

4. Untuk tahun 2017 rasio efisiensi mengalami penurunan menjadi 99,69%, yang termasuk dalam kategori kurang efisien karena berada diantara 90% dan 100%.
5. Ditahun 2018 rasio efisiensi mengalami penurunan menjadi 99,05%, yang termasuk dalam kategori kurang efisien karena berada diantara 90% sampai 100%. Dapat dikatakan, Rasio Efisiensi yang paling rendah berada pada tahun 2014, yaitu sebesar 92,12% yang menunjukkan bahwa kinerja pemerintah Kota Medan dapat dikatakan masih belum efisien di tahun 2014-2018.

Grafik pengukuran kinerja *Value for Money* untuk rasio efisiensi dari tahun anggaran 2014 sampai dengan tahun 2018 sebagai berikut :

Grafik 4.2
Perkembangan Rasio Efisiensi Pemerintah Daerah Kota Medan
Tahun Anggaran 2014 – 2018



Sumber : Data diolah

Berdasarkan grafik 4.2 menunjukkan bahwa terjadi kenaikan dan penurunan pada rasio efisiensi. Rasio efisiensi untuk tahun anggaran 2014 sampai

dengan 2015 mengalami kenaikan sebesar 10,6% yang menyebabkan rasio efisiensi berada dalam kategori tidak efisien. Tahun anggaran 2015 sampai dengan 2016 mengalami kenaikan sebesar 2,28% dan kembali berada dalam kategori tidak efisien. Tahun anggaran 2016 dengan 2017 mengalami penurunan sebesar 5,31% dan termasuk dalam kategori kurang efisien. Tahun anggaran 2017 dengan 2018 mengalami penurunan sebesar 0,64% masih termasuk dalam kategori kurang efisien.

Melalui analisis rasio efisien dapat diketahui seberapa besar efisien dalam belanja daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah Kota Medan. Dengan perhitungan rasio efisiensi ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar belanja daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Medan dalam meningkatkan pendapatan daerah. Dapat dikatakan untuk tahun 2014-2018 Pemerintah Kota Medan belum mampu menggunakan sumber daya yang diperlukan dengan mengefisienkan pengeluaran untuk mencapai target yang dicapai. Apabila pemerintah daerah berhasil merealisasikan anggaran belanja sesuai dengan target yang ditetapkan, keberhasilan itu kurang memiliki arti apabila ternyata biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan anggaran belanja tersebut lebih besar daripada realisasi anggaran pendapatan yang diterima.

3. Rasio Efektivitas

Efektivitas merupakan rasio yang menggambarkan akibat dari dampak (outcome) dari output program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Pengukuran efektivitas merupakan hubungan antara keluaran (output) dengan tujuan. Efektivitas tidak menyatakan seberapa besar biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Efektivitas juga dapat diartikan sebagai ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu

organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif.⁶⁵

Kinerja Pemerintah Daerah Kota Medan dikatakan efektif apabila rasio yang dihasilkan atau dicapai adalah lebih dari 100%. Semakin tinggi nilai rasio efektivitas maka semakin baik kinerja Pemerintah Daerah Kota Medan.⁶⁶

Berikut diuraikan perhitungan rasio efektivitas berdasarkan rumus yang digunakan yaitu sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Target Pendapatan}} \times 100 \%$$

Ketentuan :

- 1) Jika > 100% maka Sangat Efektif
- 2) Jika 90%-100% maka Efektif
- 3) Jika 80%-90% maka Cukup Efektif
- 4) Jika 60%-80% maka Kurang Efektif
- 5) Jika < 60% maka Tidak Efektif

Tabel 4.8
Rasio Efektivitas Pemerintah Kota Medan

Tahun	Realisasi Pendapatan	Anggaran Pendapatan	Rasio Efektivitas
2014	4.042.115.828.231,62	4.560.412.529.543,87	88,63%
2015	4.259.044.490.715,42	5.046.111.839.162,45	84,40%
2016	4.308.116.916.024,91	5.490.162.683.364,97	78,46%
2017	4.409.065.482.200,50	5.523.623.117.419,00	79,82%
2018	4.253.618.758.533,00	5.239.408.011.116,00	81,18%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran yang telah diolah

⁶⁵Ulum. Ihyaul MD, *Akuntansi Sektor Publik*, (Malang, UMM Press: Malang, 2004), h. 294.

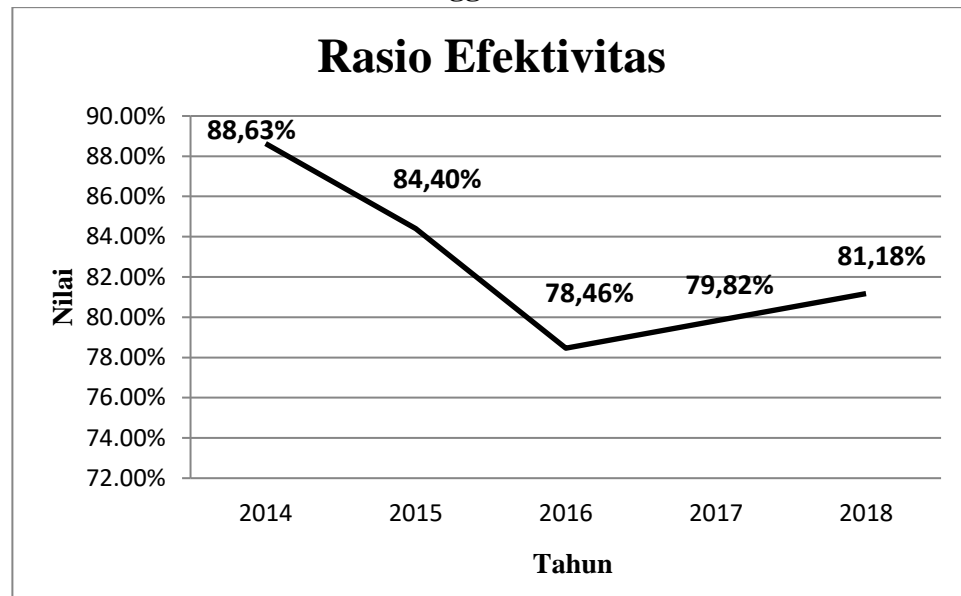
⁶⁶Abdul Halim, *Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah*, h. 135.

Dilihat dari tabel 4.8, maka untuk Rasio Efektivitas Pemerintah Kota Medan yang diukur dalam 5 tahun, dimana :

1. untuk tahun 2014 rasio efektivitas sebesar 88,63% yang termasuk dalam kategori cukup efektif karena untuk tahun 2014 berada diantara 80% sampai dengan 90%.
2. Untuk tahun 2015 Rasio Efektivitas mengalami penurunan menjadi 84,40% dan termasuk dalam kategori cukup efektif karena berada diantara 80% sampai dengan 90%.
3. Untuk tahun 2016 Rasio Efektivitas kembali mengalami penurunan menjadi 78,46% dan termasuk dalam kategori kurang efektif karena berada diantara 60% sampai dengan 80%.
4. Untuk tahun 2017 Rasio Efektivitas mengalami kenaikan namun masih berada dalam kategori kurang efektif karena berada diantara 60% sampai dengan 80%.
5. Kemudian untuk tahun 2018 Rasio Efektivitas mengalami kenaikan sebesar 81,18% yang mana termasuk dalam kategori cukup efektif karena berada diantara 80% sampai dengan 90%. Rasio Efektivitas yang tertinggi berada pada tahun 2014, yang termasuk dalam kategori cukup efektif yaitu 88,63%.

Grafik pengukuran kinerja *Value for Money* untuk rasio efektivitas dari tahun anggaran 2014 sampai dengan tahun 2018 sebagai berikut :

Grafik 4.3
Perkembangan Rasio Efektivitas Pemerintah Daerah Kota Medan
Tahun Anggaran 2014 – 2018



Sumber : Data diolah

Berdasarkan grafik 4.3 menunjukkan bahwa terjadi kenaikan dan penurunan pada rasio efektivitas. Rasio efektivitas untuk tahun anggaran 2014 sampai dengan 2015 mengalami penurunan sebesar 4,23% yang menyebabkan rasio efektifitas berada dalam kategori cukup efektif. Tahun anggaran 2015 sampai dengan 2016 mengalami penurunan sebesar 5,94% dan kembali berada dalam kurang efektif. Tahun anggaran 2016 dengan 2017 mengalami kenaikan sebesar 1,36% dan termasuk dalam kategori kurang efektif. Tahun anggaran 2017 dengan 2018 mengalami kenaikan sebesar 1,36% termasuk dalam kategori cukup efektif. Tahun anggaran 2014 menjadi yang terbaik karena menghasilkan rasio efektivitas sebesar 88,63% dan dikatakan cukup efektif.

Pemerintah daerah dikatakan berhasil jika dapat merealisasikan anggaran pendapatan lebih besar dari target pendapatan yang ditetapkan, dan biaya yang

dikeluarkan untuk merealisasikan anggaran belanja lebih kecil dari target belanja yang diterima. Dapat dikatakan bahwa untuk tahun 2014-2018 perhitungan kinerja menggunakan rasio efektivitas dikategorikan cukup efektif. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Medan sudah berhasil dalam menjalankan program kerjanya, karena realisasi anggaran sudah mendekati target anggaran yang telah ditetapkan. Tetapi masih banyak output yang dihasilkan terhadap pencapaian belum sesuai tujuan atau sasaran.

4. Hasil Wawancara

a. Anggaran Pendapatan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syahrial Rangkuti (Narasumber 1) mengatakan bahwa mengenai anggaran pendapatan dari segi penyusunan anggaran pendapatan dilakukan dengan cara terkomputerisasi dan proses penyusunan APBD sebagai berikut:⁶⁷

1. Pemerintah Daerah mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD, disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD pada minggu pertama bulan Oktober tahun sebelumnya. Pengambilan keputusan oleh DPRD mengenai rancangan peraturan daerah tentang APBD dilakukan selambat-lambatnya satu bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.
2. Sesudah RAPBD disetujui oleh DPR, RAPBD kemudian ditetapkan menjadi APBD melalui Peraturan Daerah yang diajukan Pemerintah Daerah, maka untuk membiayai keperluan setiap bulan Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya.

⁶⁷Wawancara dengan Syahrial Rangkuti, tanggal 11 Maret 2020 di Kantor BPKAD Kota Medan.

3. Setelah APBD ditetapkan dengan peraturan daerah, pelaksanaannya dituangkan lebih lanjut dengan keputusan Gubernur/Bupati/Walikota.

Syahrial Rangkuti (Narasumber 1) menyatakan bahwa, dalam proses penyusunan anggaran, mengacu pada Peraturan Pemerintah 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran dapat dibagi menjadi tiga kategori utama yaitu:⁶⁸

1. **Eksekutif**, secara umum eksekutif bertanggungjawab untuk membuat keputusan dan melaksanakan undang-undang negara. Eksekutif bertanggungjawab untuk merancang anggaran. Eksekutif juga harus membuat kerangka pengeluaran jangka menengah, mengatur seluruh sumber daya keuangan negara dan memonitor departemen dalam membelanjakan uang negara.

2. **Legislatif**, membuat dan mengesahkan undang-undang serta mengawasi eksekutif. Reformasi proses anggaran mencoba merorganisasi proses anggaran, sehingga legislatif lebih berperan dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Sebenarnya legislatif mempunyai wewenang untuk mengubah anggaran, tetapi tidak dapat membuat ulang anggaran, melainkan hanya dengan mengubah pembelanjaan dalam anggaran. Legislatif bertanggungjawab menentukan visi, misi, tujuan, arah dan kebijakan, strategi, dan penentuan prioritas secara luas baik ditingkat nasional maupun daerah. Tanggungjawab utamanya adalah memformulasikan strategi di tingkat nasional dan di tingkat daerah. Reformasi anggaran harus dapat meningkatkan peran legislatif dalam proses anggaran. Kemampuan legislatif untuk memenuhi kewajibannya terkadang dibatasi oleh keterbatasan waktu untuk

⁶⁸Wawancara dengan Syahrial Rangkuti, tanggal 11 Maret 2020 di Kantor BPKAD Kota Medan.

mengkaji dan membahas anggaran dalam komisi. Keadaan tersebut menyebabkan peran legislatif berkurang karena cenderung hanya sebagai formalitas dalam proses anggaran, sehingga tidak mereviewnya secara lebih mendalam.

3. Masyarakat, keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan anggaran diharapkan akan mampu mengatasi berbagai permasalahan anggaran, seperti kebocoran dan pemborosan atau penyimpangan pengalokasian anggaran yang cenderung lebih berorientasi pada kepentingan birokrasi dan bukan kepentingan masyarakat. Peran aktif masyarakat dengan cara memberikan informasi, menyampaikan saran dan pendapatnya secara bertanggungjawab dan langsung kepada DPR atau melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan organisasi sosial kemasyarakatan di daerah.

Syahrial Rangkuti (Narasumber 1) mengungkapkan bahwa komponen-komponen dalam penyusunan APBD yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Anggaran Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.⁶⁹

Adapun faktor yang menghambat selama proses penyusunan anggaran yaitu:

1. Pelaksanaan pendekatan partisipatif dalam perencanaan melalui mekanisme musrenbang yang belum maksimal.
2. Kualitas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Rensta) SKPD yang belum optimal.
3. Adanya intervensi pada proses penyusunan perencanaan.
4. Koordinasi antar SKPD masih lemah.

⁶⁹Wawancara dengan Syahrial Rangkuti, tanggal 11 Maret 2020 di Kantor BPKAD Kota Medan.

5. Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang kompeten dalam manajemen perencanaan dan penganggaran.
6. Faktor team work dan komitmen.
7. Intervensi dan hak budget DPRD terlalu kuat.
8. Sumber Daya Manusia (SDM) evaluasi anggaran pada pemerintah provinsi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Nina Anggini Lubis (Narasumber 2), Penyebab rendahnya penyerapan anggaran di daerah adalah lamanya proses pembuatan rancangan anggaran atau perubahan, ketakutan pemerintah daerah atas tuduhan korupsi, sistem birokrasi yang berbelit-belit, dan kurang akuratnya perencanaan pembangunan daerah. Selama tahap realisasi anggaran, kegiatan dalam pencairan anggaran diantaranya:⁷⁰

1. Pihak ketiga selaku rekanan atau penyedia barang/jasa yang mengajukan tagihan kepada pemerintah.
2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang mengajukan SPP-LS/SPP-GUP pada suatu kantor atau satuan kerja.
3. Pejabat penguji SPP atau penerbit SPM yang melakukan pengujian SPP yang diajukan PPK dan menerbitkan SPM.
4. KPPN selaku kuasa BUN, menerbitkan SP2D setelah menerima SPM dari kantor atau satuan kerja.
5. Pihak perbankan selaku bank operasional KPPN yang melakukan pemindah bukuan sejumlah uang ke rekening yang berhak.

Menurut responden Nina Anggini Lubis (Narasumber 2) , Sisa anggaran tahun lalu dapat dijadikan sumber penerimaan tahun berikutnya dengan penambahan anggaran pendapatan tahun berikutnya. Jika terjadi kasus hal yang mendadak, dana perimbangan bisa digunakan tetapi tidak

⁷⁰Wawancara dengan Nina Anggina Lubis, tanggal 13 Maret 2020 di Kantor BPKAD Kota Medan.

untuk menutupi pengeluaran daerah melainkan untuk bantuan sosial.⁷¹

b. *Value for Money*

Berdasarkan wawancara dengan Erlina Riz (Narasumber 3) mengenai *value for money* untuk mendapatkan nilai yang lebih ekonomis, tidak perlu melakukan survei harga untuk mengetahui perbandingan harga karena pemerintah sudah memberikan daftar pedoman harga jadi tinggal menggunakan anggaran untuk belanja sesuai dengan harga yang sudah ditetapkan. Sedangkan mengenai input sudah digunakan untuk pelaksanaan suatu kebijakan maupun aktivitas lainnya sudah dilaksanakan untuk belanja daerah yang sesuai dengan tercantum dalam APBD.

Untuk efisiensi, penggunaan realisasi belanja daerah dalam penggunaannya sudah diminimalkan biaya realisasi belanja daerahnya untuk memaksimalkan hasil dari belanja tersebut. Sedangkan untuk pemakaian dana output yang berlebih itu tidak ada karena dana output sudah dirancang sedemikian rupa untuk penggunaannya masing-masing.⁷²

Menurut responden Erlina Riz (Narasumber 3), penyebab rendahnya penyerapan anggaran di daerah adalah lamanya proses pembuatan rancangan anggaran atau perubahan, ketakutan pemerintah daerah atas tuduhan korupsi, sistem birokrasi yang berbelit-belit, dan kurang akuratnya perencanaan pembangunan daerah. Adapun dampak yang dihasilkan dari realisasi yang jauh dari target yang ditetapkan yaitu:⁷³

1. Rendahnya efek berganda perekonomian nasional

Dalam kondisi seperti ini, faktor belanja daerah menjadi hal utama sebagai stimulus pertumbuhan ekonomi, karena pertumbuhan ekonomi berefek pada rendahnya penciptaan lapangan kerja sehingga

⁷¹Ibid

⁷²Wawancara dengan Erlina Riz, tanggal 16 Maret 2020 di Kantor BPKAD Kota Medan.

⁷³Ibid.

angka kemiskinan sulit diturunkan. Stimulus yang sangat diharapkan untuk membantu perekonomian adalah belanja barang dan belanja modal.

2. Anggaran yang dikeluarkan pemerintah menjadi sia-sia

Dalam mempersiapkan anggaran, pemerintah telah memperhitungkan defisit anggaran yang kemudian dibiayai melalui utang, jika utang sudah cair, adanya commitment fee yang harus ditanggung pemerintah. Jika anggaran tidak segera digunakan, pemerintah tetap dibebani commitment fee tersebut.

5. Pembahasan

1. Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Medan berdasarkan Rasio *Value for Money*

Berikut ini adalah data hasil perhitungan mengenai tingkat ekonomis, efisiensi dan efektivitas Anggaran Pendapatan Kota Medan :

Tabel 4.9
Pengukuran Tingkat Ekonomis, Efisiensi dan Efektivitas
Anggaran Pendapatan
Kota Medan
Tahun 2014-2018

Tahun	2014	2015	2016	2017	2018
Rasio Ekonomis	80,50%	80%	79%	79%	77,31%
Kriteria	Cukup Ekonomis	Cukup Ekonomis	Kurang Ekonomis	Kurang Ekonomis	Kurang Ekonomis
Rasio Efisiensi	92,12%	102,72%	105%	99,69%	99,05%
Kriteria	Kurang Efisien	Tidak Efisien	Tidak Efisien	Kurang Efisien	Kurang Efisien
Rasio Efektivitas	88,63%	84,40%	78,46%	79,82%	81,18%
Kriteria	Cukup Efektif	Cukup Efektif	Kurang Efektif	Kurang Efektif	Cukup Efektif

a. Rasio Ekonomi

Rasio ekonomis Pemerintah Kota Medan yang diukur selama 5 tahun (2014-2018), dimana untuk tahun 2014 diperoleh rasio ekonomis sebesar 80,50% berada dalam kategori cukup ekonomis, untuk tahun 2015 diperoleh rasio ekonomis sebesar 80% dan berada dalam kategori cukup ekonomis, untuk tahun 2016 diperoleh rasio ekonomis sebesar 79% dan berada dalam kategori kurang ekonomis, untuk tahun 2017 diperoleh rasio ekonomis sebesar 79% dan berada dalam kategori kurang ekonomis, kemudian untuk tahun 2018 diperoleh rasio ekonomis sebesar 77,31% dan berada dalam kategori kurang ekonomis. Rasio Ekonomis kinerja keuangan Pemerintah Kota Medan tahun 2014-2018 untuk keseluruhan diperoleh rata-rata sebesar 79% yang mana termasuk dalam kategori kurang ekonomis. Ini menunjukkan bahwa pemerintah Kota Medan belum dapat mengelola anggaran dengan cara yang ekonomis. Pengukuran ekonomi bertujuan untuk mengetahui kinerja Pemerintah Kota Medan periode tahun 2014-2018 dalam memperoleh dan mengelola sumber daya (input) yang dibutuhkan agar dapat menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif. Keekonomian suatu kegiatan tidak hanya dilihat dari besarnya penghematan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Medan, tetapi juga harus mempertimbangkan keluaran (output) yang dihasilkan. Penghematan menjadi berkurang maknanya jika keluaran (output) yang dihasilkan tidak sesuai target atau tidak dapat tercapai secara maksimal. Ekonomis terkait dengan sejauh mana dapat meminimalisir input primer yang berupa anggaran atau kas menjadi input sekunder berupa tenaga kerja, bahan, infrastruktur dan barang modal yang dikonsumsi untuk pelaksanaan kegiatan operasi organisasi, dengan menggunakan anggaran dengan hemat (tidak boros) dan mampu mengelola keuangan dengan baik.

b. Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi Pemerintah Kota Medan yang diukur selama 5 tahun (2014-2018), dimana untuk tahun 2014 diperoleh rasio efisiensi sebesar 92,12% berada dalam kategori kurang efisien, untuk tahun 2015 diperoleh rasio efisiensi sebesar 102,72% dan berada dalam kategori tidak efisien, untuk tahun 2016 diperoleh rasio efisiensi sebesar 105% dan berada dalam kategori tidak efisien, untuk tahun 2017 diperoleh rasio efisiensi sebesar 99,69% dan berada dalam kategori kurang efisien, kemudian untuk tahun 2018 diperoleh rasio efisiensi sebesar 99,05% dan berada dalam kategori kurang efisien. Rasio Efisiensi kinerja keuangan Pemerintah Kota Medan tahun 2014-2018 secara keseluruhan diperoleh rata-rata sebesar 99,71% yang mana termasuk dalam kategori kurang efisien. Penyebab terjadinya ketidakefisienan anggaran tersebut dikarenakan terjadinya pemborosan-pemborosan pada sektor tertentu, seperti sudah tersedianya fasilitas yang sudah memadai tetapi masih ada anggaran untuk renovasi dan pengembangan, ini dapat dilihat dari besarnya anggaran belanja yang setiap tahun terus mengalami kenaikan, kemudian penyebab ketidakefisienan anggaran yaitu besarnya pengeluaran belanja yang didominasi belanja pegawai, seperti perjalanan dinas/kegiatan rapat diluar kantor atau pengadaan kendaraan dinas baru di Instansi pemerintahan. Besarnya realisasi anggaran belanja dari realisasi pendapatan yang diterima mengindikasikan bahwa tingkat efisiensi pengelolaan keuangan masih sangat kurang dan terkesan adanya pemborosan dengan tidak mengindahkan azas penghematan dan efisiensi anggaran belanja daerah. Keberhasilan pemerintah dalam merealisasikan target anggaran belanja sesuai dengan target yang telah ditetapkan, kurang memiliki arti apabila biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target anggaran belanja lebih besar dari realisasi anggaran pendapatan yang diterima.

c. Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas Pemerintah Kota Medan yang diukur selama 5 tahun (2014-2018), dimana untuk tahun 2014 diperoleh rasio efektivitas sebesar 88,63% berada dalam kategori cukup efektif, untuk tahun 2015 diperoleh rasio efektivitas sebesar 84,40% dan berada dalam kategori cukup efektif, untuk tahun 2016 diperoleh rasio efektivitas sebesar 78,46% dan berada dalam kategori kurang efektif, untuk tahun 2017 diperoleh rasio efektivitas sebesar 70,82% dan berada dalam kategori kurang efektif, kemudian untuk tahun 2018 diperoleh rasio efektivitas sebesar 81,18% dan berada dalam kategori cukup efektif. Rasio Efektivitas kinerja keuangan Pemerintah Kota Medan dari tahun 2014-2018 diperoleh rata-rata sebesar 82,49% yang mana termasuk dalam kategori cukup efektif. Pengukuran Efektivitas merupakan rasio yang menggambarkan akibat dari dampak (outcome) dari output program dalam mencapai tujuan program. Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Medan sudah berhasil dalam menjalankan program kerjanya, karena realisasi anggaran sudah mendekati target anggaran yang telah ditetapkan. Tetapi masih banyak output yang dihasilkan terhadap pencapaian belum sesuai tujuan atau sasaran. Contohnya adalah proyek pembangunan tanpa manfaat di Kota Medan dapat dijumpai pada proyek Sky Bridge yang sampai saat ini proyek dengan anggaran sebesar Rp. 35 Miliar tersebut tidak member manfaat apapun bagi warga kota karena tak kunjung difungsikan dan terbengkalai. Kemudian, proyek pembangunan kanal banjir di Titi Kuning. Proyek yang diharapkan mampu mengatasi masalah banjir di Kota Medan ini belum memberi manfaat berarti dalam pengendalian

banjir kota. Di kawasan jalan Brigjen Katamso, STM, Marendal dan Johor, apabila memasuki musim penghujan menjadi langganan banjir dengan tingkat genangan air yang cukup tinggi. Pengukuran efektivitas Kota Medan belum memenuhi kriteria sangat efektif karena realisasi anggaran belum mendekati target anggaran yang telah ditetapkan. Anggaran yang cukup jauh perbedaannya dengan target yang diharapkan disebabkan oleh adanya kegiatan yang dianggarkan, tetapi tidak dilaksanakan.

Adapun cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan rasio value for money agar kedepannya dapat memenuhi kriteria adalah:

- Rasio Ekonomi yang tidak memenuhi kriteria, agar memaksimalkan penggunaan biaya untuk belanja modal, karena dana yang dikeluarkan untuk belanja modal masih terlalu jauh dari anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat dan dianggap belum maksimal dalam pelayanan masyarakat. Ekonomi sering disebut kehematan yang mencakup juga pengelolaan secara berhati-hati atau cermat dan tidak ada pemborosan.⁷⁴
- Rasio Efisiensi yang tidak memenuhi kriteria efisien, agar menekankan biaya untuk belanja operasi khususnya belanja pegawai dan meningkatkan belanja modal agar kualitas masyarakat seimbang dengan belanja yang dikeluarkan pemerintah daerah. Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya (spending well).⁷⁵
- Rasio Efektivitas yang tidak memenuhi kriteria efektif, berusaha semaksimal mungkin didalam meningkatkan pendapatan daerah

⁷⁴Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, 2002, h. 131.

⁷⁵Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, 2002, h. 131.

khususnya pendapatan asli daerah dengan baik melalui pajak maupun retribusi, sehingga hasil yang dicapai lebih kecil dari target yang telah ditetapkan. Efektivitas merupakan ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan efektif.⁷⁶

2. Rasio *Value for Money* pada Pemerintah Kota Medan belum memenuhi standar berdasarkan Kepmendagri No. 600.900-327 Tahun 1996.

Dari hasil penelitian, Rasio *Value for Money* pada Pemerintah Kota Medan belum memenuhi standar berdasarkan Kepmendagri No. 600.900-327 Tahun 1996. Dimana, menurut standar dari Kepmendagri No. 600.900-327 Tahun 1996, suatu kinerja dikatakan ekonomis apabila rasio ekonomis mencapai $\geq 90\%$, dikatakan efisiensi apabila rasio efisiensi mencapai $\leq 80\%$, dan dikatakan efektif apabila rasio efektivitas mencapai $\geq 90\%$. Dari perhitungan untuk ketiga rasio, tidak ada satupun yang mencapai standar berdasarkan Kepmendagri No. 600.900-327 Tahun 1996. Dapat disimpulkan bahwa kinerja Pemerintah Kota Medan tergolong belum maksimal karena indikator pengukurannya yaitu rasio ekonomis masih tergolong kurang ekonomis dikarenakan kecilnya jumlah belanja atas pemungutan pendapatan daerah pada Pemerintah Daerah Kota Medan, dengan menurunnya rasio ekonomis ini menunjukkan bahwa penggunaan dalam biaya pemungutan pendapatan daerah kurang ekonomis pada Pemerintah Daerah Kota Medan. Untuk rasio efisiensi masih tergolong tidak efisien karena disebabkan Pemerintah Daerah Kota Medan tidak mampu mengefisiensikan biaya yang dikeluarkan atas pendapatan daerah Kota Medan. Sedangkan rasio efektivitas juga belum efektif dan

⁷⁶Ibid. h. 132.

penurunan yang terjadi untuk rasio efektivitas atas pendapatan daerah, menunjukkan bahwa kinerja dari pendapatan daerah Kota Medan mengalami penurunan.

Faktor penyebab rasio *value for money* pada pemerintah kota medan belum memenuhi standar adalah:

c. Rasio Ekonomi

Penyebab terjadinya rasio ekonomi tidak memenuhi kriteria ekonomis dikarenakan besarnya realisasi atas belanja daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Medan. Dengan menurunnya tingkat rasio ekonomis Pemerintah Daerah Kota Medan, menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kota Medan kurang mampu dalam melakukan memaksimalkan dana anggaran belanja daerah.

Berdasarkan dari wawancara yang dilakukan dimana Pemerintah Kota Medan dalam melakukan anggaran atas biaya yang dikeluarkan berdasarkan dari penentuan atas anggaran dari tahun sebelumnya tanpa melihat dari realisasi atas biaya yang dikeluarkan dari sebelumnya.

d. Rasio Efisien

Penyebab terjadinya rasio efisiensi tidak memenuhi kriteria efisien dikarenakan besarnya belanja yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Medan, bahkan realisasi belanja daerah melebihi dari target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dengan meningkatnya rasio efisiensi menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah mengalami penurunan dalam menghemat belanja daerah, atas pendapatan daerah yang diperoleh Pemerintah Kota Medan.

Berdasarkan dari wawancara yang dilakukan dimana Pemerintah Kota Medan belum bisa menekankan biaya operasi khususnya belanja pegawai yang dianggap terlalu besar anggaran belanja maupun realisasi belanja.

e. Rasio Efektivitas

Penyebab terjadinya rasio efektivitas tidak memenuhi kriteria efektif dikarenakan pemerintah daerah tidak mampu dalam mencapai target pendapatan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah tersebut. Dengan menurunnya rasio efektivitas menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah mengalami penurunan.

Berdasarkan dari wawancara yang telah dilakukan, dimana Pemerintah Kota Medan untuk Pendapatan Asli Daerah yang mengalami penurunan terjadi dikarenakan penganggaran atau target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota atas Pendapatan Asli Daerah belum dikelola dengan baik sehingga untuk pelayanan terhadap masyarakat belum terpenuhi.

Intansi diharapkan dapat lebih memperhatikan penggunaan anggaran belanja daerah, sehingga tidak terjadi lagi pemborosan dana yang melebihi dari target yang telah diberikan, dapat mengefisiensikan anggaran belanjanya dengan baik, sehingga lebih tepat dalam penggunaan dana yang diberikan oleh negara dan tidak terjadi penggunaan dana yang berlebihann untuk menjalankan program kerjanya. Instansi juga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelayanannya, sehingga dengan output yang cukup besar diharapkan dapat meningkatkan efektivitas, karena efektivitas suatu program dapat meningkat apabila masyarakat puas terhadap pelayanan yang diberikan kepada mereka.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kota Medan berdasarkan rasio Value for Money tergolong belum baik, karena realisasi program yang diukur dari tingkat rasio Value for Money selama tahun 2014-2018 mengalami penurunan setiap tahunnya. Rasio ekonomis belum dapat dikatakan ekonomis karena berdasarkan rasio ekonomis yang dihitung selama 5 tahun rata-rata berada diantara 79% yang mana masih termasuk dalam kategori kurang ekonomis. Dari segi efisiensi memiliki rata-rata rasio efisiensi yaitu 99,71% yang termasuk dalam kategori kurang efisien. Dan dari segi efektivitas, rata-rata rasio efektivitas sebesar 82,49% yang mana termasuk dalam kategori cukup efektif. Cara yang dilakukan untuk meningkatkan rasio value for money pada Pemerintah Kota Medan adalah Pemerintah Kota Medan harus optimal dalam mendapatkan pendapatan daerah, khususnya pendapatan asli daerah (PAD) dalam meningkatkan hasil kekayaan daerah agar mengurangi sumbangan dari pemerintah pusat dan penggunaan anggaran belanja daerah dilakukan tepat sasaran untuk memaksimalkan program kerja Pemerintah Kota Medan, serta menekankan biaya untuk belanja operasi dan meningkatkan belanja modal agar kualitas pelayanan kepada masyarakat seimbang dengan belanja yang dikeluarkan pemerintah daerah.
2. Dari hasil penelitian, Rasio *Value for Money* pada Pemerintah Kota Medan belum memenuhi standar berdasarkan Kepmendagri No. 600.900-327 Tahun 1996. Dimana, menurut standar dari Kepmendagri No. 600.900-327 Tahun 1996, suatu kinerja dikatakan ekonomis apabila rasio ekonomis mencapai $\geq 90\%$, dikatakan efisiensi apabila rasio efisiensi mencapai $\leq 80\%$, dan dikatakan efektif apabila rasio efektivitas mencapai

$\geq 90\%$. Dari perhitungan untuk ketiga rasio, tidak ada satupun yang mencapai standar berdasarkan Kepmendagri No. 600.900-327 Tahun 1996. Dapat disimpulkan bahwa kinerja Pemerintah Kota Medan tergolong belum maksimal.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah Kota Medan

Dengan demikian instansi diharapkan dapat lebih memperhatikan penggunaan anggaran belanja daerah yang kurang dimaksimalkan, dan memperhatikan penggunaan anggaran belanja daerah yang berlebih sehingga tidak terjadi lagi pemborosan dana yang melebihi dari target yang telah diberikan, dapat mengefisiensikan anggaran belanjanya dengan baik, sehingga lebih tepat dalam penggunaan dana yang diberikan oleh Negara dan tidak terjadi penggunaan dana yang berlebihan untuk menjalankan program kerjanya. Instansi juga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelayanannya, sehingga dengan output yang cukup besar diharapkan dapat meningkatkan efektivitas, karena efektivitas suatu program dapat meningkat apabila masyarakat puas terhadap pelayanan yang diberikan kepada mereka.

2. Bagi Masyarakat

Diharapkan bagi masyarakat daerah untuk berperan serta mendukung upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan daerah yang lebih baik. Masyarakat daerah sebagai pelaku ekonomi, khususnya wajib pajak diharapkan sadar akan kewajibannya terhadap perekonomian daerah.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan topik yang sama, diharapkan untuk melakukan pengukuran kinerja tidak hanya diukur dengan konsep value for money saja, tetapi juga dapat diukur

dengan menggunakan rasio keuangan daerah sehingga hasil penelitian menunjukkan hasil yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim.

Apriza, Hanifa. *Analisis Value for Money Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2016.

Bastian, Indra, dan Gatot Soepriyanto. *Sistem Akuntansi Sektor Publik, Konsep Untuk Pemerintah Daerah*. Jakarta: Salemba Empat, 2003.

Bastian, Indra. *Akuntansi Sektor Publik, Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga, 2006.

Depdagri. Kepmendagri No.690.900.327. 1996, Tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan, 1997.

Halim, Abdul. *Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah Yogyakarta: Seri Bunga Rampai UUP AMP YMPN*, 2002..

_____. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat, 2004.

_____. *Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Ketiga: Salemba Empat, 2007.

Ikhsan, Arfan dan Misri. *Metodelogi Penelitian untuk Manajemen, Akuntansi dan Bisnis*. Bandung: Ciptapustaka Media Perintis, 2012.

Ikhsan, Arfan Dan Imam Ghozali. *Metode Penelitian Untuk Akuntansi Dan Manajemen*. Medan: PT. Madju Medan Cipta, 2006

- Mahmudi. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2007
- Mahsun, Muhammad. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE, 2006.
- Mamesah. *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Pusat Utama, 1995.
- Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi, 2002.
- _____. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi, 2009.
- Mulyadi. *Sistem Akuntansi. Edisi Ketiga*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, 2003.
- Moleong, Lexy J. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Remaja Rosdakary, 2006.
- Nordiawan, Deddi. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat, 2009.
- Pane, Analisis *Value for Money* Untuk mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Medan Tahun 2011-2015. *Skripsi*. Universitas Sumatera Utara, 2017.
- Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

Renyowijoyo Muindro. *Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba Edisi Ketiga*.
Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012.

Tarigan, Azhari Akmal. *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi: Sebuah Eksplorasi Melalui Kata-
Kata Kunci dalam Al-Qur'an*. Bandung: Ciptapustaka Media Perintis, 2014.

Umar, Husein. *Metodelogi Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2004.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan, *Laporan Realisasi
Anggaran*. Tahun 2014-2016. bpkad.pemkomedan.go.id

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), Kementerian Keuangan Republik
Indonesia. *Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*. Tahun 2017 dan
2018. www.djpk.go.id

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan(DJPK), Kementerian Keuangan Republik
Indonesia *Laporan Realisasi Anggaran*. Tahun 2017 dan 2018. www.djpk.go.id

Saputra, Muhammad. "Permasalahan Anggaran". <https://www.kompasiana.com>.
Diunduh pada tanggal 2 Desember 2019.

TJ, Putra. "Sky Bridge: Proyek Rp35 Miliar yang Terbangkalai 5 Tahun".
<https://www.gatra.com>. Diunduh pada tanggal 2 Desember 2019.

LAMPIRAN**LEMBAR WAWANCARA**

Narasumber : 3 orang

- Syahrial Rangkuti (Kepala Bagian Bidang Anggaran)
- Nina Anggina Lubis (Anggota/Staf Bidang Anggaran)
- Erlina Riz (Sub Bidang Pendapatan)

Tempat : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
Kota Medan.

No.	Daftar Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana proses penyusunan anggaran pendapatan? Apakah masih dilakukan dengan manual atau terkomputerisasi?	
2	Dalam proses penyusunan anggaran, siapa saja yang dilibatkan?	
3	Apakah dalam penyusunan anggaran berdasarkan aturan yang berlaku? (Permendagri no 13 tahun 2006?)	
4	Bagaimana pelaksanaan penganggaran dalam mencapai tujuan pemerintahan daerah?	
5	Bagaimana menentukan komponen-komponen dalam penyusunan anggaran?	
6	Apa saja faktor yang menghambat proses penyusunan anggaran?	
7	Apa penyebab jika serapan/realisasi anggaran rendah?	

8	Selama tahap realisasi anggaran, bagaimana kegiatan dalam pencairan anggarannya?	
9	Apakah sisa anggaran tahun lalu dapat dijadikan sumber penerimaan untuk tahun berikutnya? Jika bisa maka sisa anggaran tahun lalu tersebut dikelompokkan dibagian penerimaan yang mana?	
10	Apakah anggaran pendapatan asli daerah dan dana perimbangan dapat digunakan untuk menutupi pengeluaran daerah jika anggaran kurang untuk pengeluaran (belanja) pemerintah daerah?	
11	Untuk pengeluaran (belanja), apakah diperlukan survei harga terlebih dahulu untuk mengetahui perbandingan harga sehingga dapat menentukan harga yang terendah agar tidak terjadi pemborosan?	
12	Apakah input sudah digunakan untuk pelaksanaan suatu kebijakan program maupun aktivitas yang semestinya?	
13	Bagaimana penggunaan output di organisasi? Apakah penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan?	
14	Apakah ada pemakaian dana output lebih yang tidak terpakai?	
15	Apakah ada dampak yang dihasilkan dari realisasi yang jauh dari target yang ditetapkan?	
16	Apa yang menyebabkan realisasi tidak mencapai target yang sudah ditentukan?	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jalan Williem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371
 Telepon (061) 6615683-6622925 Faximili (061) 6615683
 Website: www.febi.uinsu.ac.id

Nomor : B-0518/EB.I/PP.00.9/02/2020 06 Februari 2020
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : **Mohon Izin Riset**

Kepada Yth:
**Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
 Medan**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara, dengan ini kami tugaskan mahasiswa:

Nama : **Debby Tamara Enre**
 NIM : 0502162082
 Tempat /Tgl. Lahir : P. Siantar, 01 Januari 1999
 Sem/Jurusan : VIII/Akuntansi Syariah

untuk melaksanakan riset di **Instansi/Lembaga** yang Bapak/Ibu Pimpin. Kami mohon kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberikan Izin riset kepada mahasiswa tersebut, guna memperoleh data-data serta informasi yang berhubungan dengan Skripsinya dengan judul:
"Analisis Value For Money Anggaran Pendapatan pada Pemerintah Kota Medan".

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam
 a.n. Dekan,
 Wakil Dekan Bidang Akademik
 dan Kelembagaan,



Dr. Muhammad Yafiz, M. Ag
 NIP. 19760423 200312 1 002

Tembusan:
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINSU Medan



PEMERINTAH KOTA MEDAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2 Medan Kode Pos 20112
Telepon. (061) 4555693 Faks. (061) 4555693
E-mail : balitbangmedan@yahoo.co.id. Website : balitbang.pemkmedan.go.id

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 070/332-/Balitbang/2020

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor: 57 Tahun 2001, Tanggal 13 November 2001 dan Peraturan Walikota Medan Nomor: 55 Tahun 2010, tanggal 24 November 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dan setelah membaca/memperhatikan surat dari: Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINSU. Nomor: B-0518/EB.I/PP.00.9/02/2020 Tanggal: 06 februari 2020 Hal: Mohon Izin Riset .

Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dengan ini memberikan Surat Rekomendasi Penelitian Kepada :

Nama : Debby Tamara Enre.
NIM : 0502162082.
Semester/Jurusan : VIII/Akuntansi Syariah.
Lokasi : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan.
Judul : "Analisis Value For Money Anggaran Pendapatan Pada Pemerintah Kota Medan".
Lamanya : 1 (Satu) Bulan.
Penanggung Jawab : Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Penelitian terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah lokasi Yang ditetapkan.
2. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Penelitian.
3. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian atau aktivitas lain di luar lokasi yang telah direkomendasikan.
4. Hasil penelitian diserahkan kepada Kepala Balitbang Kota Medan selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah penelitian Dalam Bentuk Soft Copy.
5. Surat rekomendasi penelitian dinyatakan batal apabila pemegang surat rekomendasi tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan.
6. Surat rekomendasi penelitian ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian Surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Medan.
Pada Tanggal : 06 Maret. 2020

An. KEPALA BALITBANG KOTA MEDAN



Tembusan :

1. Walikota Medan (sebagai Laporan).
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan.
3. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINSU.
4. Yang Bersangkutan.



PEMERINTAH KOTA MEDAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 Medan, Kode Pos - 20112
 Telepon : (061) 4512412, Faks : (061) 4579228, Website : pemkomedan.go.id

SURAT KETERANGAN

NO. 106 / Anggaran / 2020

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan, dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa/i sebagai berikut :

Nama	: Debby Tamara Enre
NIM	: 0502162082
Universitas / Fakultas	: UINSU / Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan / Program Studi	: Akuntansi Syariah / S-1

Telah selesai melaksanakan penelitian / riset di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan pada Bidang Anggaran dari Tanggal 06 Maret – 06 April 2020.

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat untuk dipergunakan seperlunya.

Medan, 8 April 2020

a.n. Kepala BPKAD Kota Medan
 Kabid Anggaran,



SYAHRIAL RANGKUTI, SE

PEMBINA

19641109 198610 1 001



PEMERINTAH KOTA MEDAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2014 DAN 2013

(dalam rupiah)

URAIAN	Reff	TA 2014		(%)	TA 2013
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN	5.1	4.560.412.529.543,87	4.042.115.828.231,62	88,63	3.276.344.285.159,73
PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.1.1	1.678.116.623.125,00	1.384.246.114.729,62	82,49	1.206.169.709.147,73
Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1	1.167.399.279.770,00	962.728.267.172,53	82,47	881.346.719.012,01
Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.2	273.992.900.000,00	171.006.302.216,00	62,41	188.459.795.128,50
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.1.1.3	6.823.791.825,00	5.705.018.825,00	83,60	9.503.605.764,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.1.1.4	229.900.651.530,00	244.806.528.516,09	106,48	126.859.589.245,22
PENDAPATAN TRANSFER	5.1.2	2.881.185.547.418,87	2.657.869.713.502,00	92,25	2.060.845.776.012,00
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	5.1.2.1	1.691.495.158.660,00	1.598.113.512.931,00	94,48	1.506.316.349.588,00
Dana Bagi Hasil Pajak	5.1.2.1.1	221.252.388.805,00	146.798.093.693,00	66,35	172.440.053.470,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	5.1.2.1.2	2.628.599.855,00	2.228.646.238,00	84,78	1.614.584.116,00
Dana Alokasi Umum	5.1.2.1.3	1.393.504.580.000,00	1.393.504.580.000,00	100,00	1.270.244.794.000,00
Dana Alokasi Khusus	5.1.2.1.4	74.109.590.000,00	55.582.193.000,00	75,00	62.016.918.000,00
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	5.1.2.2	401.536.937.000,00	364.744.140.000,00	90,84	363.758.805.000,00
Dana Penyesuaian	5.1.2.2.1	401.536.937.000,00	364.744.140.000,00	90,84	363.758.805.000,00
Transfer Pemerintah Provinsi	5.1.2.3	788.153.451.758,87	695.012.060.571,00	88,18	190.770.621.428,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.1.2.3.1	787.847.585.421,87	694.490.156.447,00	88,15	190.770.621.428,00
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	5.1.2.3.2	305.866.337,00	521.904.124,00	170,63	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	5.1.3	1.110.359.000,00	0,00	0,00	9.328.800.000,00
Pendapatan Lainnya		1.110.359.000,00	0,00	0,00	9.328.800.000,00
BELANJA	5.2	4.625.169.942.881,00	3.723.643.299.085,60	80,51	3.224.449.048.408,88
BELANJA OPERASI	5.2.1	3.579.613.342.151,00	2.939.241.615.113,97	82,11	2.593.084.833.763,88
Belanja Pegawai	5.2.1.1	2.401.084.233.215,00	2.049.029.168.377,00	85,34	1.912.221.528.149,00
Belanja Barang	5.2.1.2	1.088.867.521.486,00	851.348.898.697,83	78,19	644.025.941.486,33
Belanja Bunga	5.2.1.3	9.000.000.000,00	1.424.780.450,14	15,83	4.993.144.103,55
Belanja Hibah	5.2.1.4	69.514.920.450,00	35.738.893.607,00	51,41	29.935.455.125,00
Belanja Bantuan Sosial	5.2.1.5	10.000.000.000,00	533.736.000,00	5,34	742.500.000,00
Belanja Bantuan Keuangan	5.2.1.6	1.166.667.000,00	1.166.137.982,00	99,95	1.166.264.900,00
BELANJA MODAL	5.2.2	1.038.556.600.730,00	783.883.177.721,63	75,48	630.802.958.785,00
Belanja Tanah	5.2.2.1	95.186.969.454,00	43.171.269.654,00	45,35	8.494.139.667,00
Belanja Peralatan dan Mesin	5.2.2.2	187.140.918.219,00	115.107.207.872,63	61,51	99.416.886.349,00
Belanja Bangunan dan Gedung	5.2.2.3	221.263.857.803,00	158.665.997.192,00	71,71	207.509.235.619,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.2.2.4	499.447.191.104,00	458.153.424.264,00	91,73	312.285.027.580,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	5.2.2.5	35.517.664.150,00	8.785.278.739,00	24,73	3.097.669.570,00
BELANJA TAK TERDUGA	5.2.3	7.000.000.000,00	518.506.250,00	7,41	561.255.860,00
Belanja Tak Terduga	5.2.3.1	7.000.000.000,00	518.506.250,00	7,41	561.255.860,00
SURPLUS / (DEFISIT)	5.3	(64.757.413.337,13)	318.472.529.146,02	(491,79)	51.895.236.750,85

URAIAN	Reff	TA 2014		(%)	TA 2013
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PEMBIAYAAN	5.4				
PENERIMAAN DAERAH	5.4.1	91.011.413.337,13	73.033.060.944,24	80,25	33.838.947.039,68
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	5.4.1.1	59.011.413.337,13	73.033.060.944,24	123,76	22.504.947.039,68
Penerimaan Pinjaman Daerah	5.4.1.2	32.000.000.000,00	0,00	0,00	11.334.000.000,00
Penerimaan Piutang Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
PENGELUARAN DAERAH	5.4.2	26.254.000.000,00	20.784.820.138,71	79,17	12.701.122.846,29
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.4.2.1	5.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Utang	5.4.2.2	21.254.000.000,00	20.784.820.138,71	97,79	12.701.122.846,29
PEMBIAYAAN NETTO		64.757.413.337,13	52.248.240.805,53	80,68	21.137.824.193,39
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		(0,00)	370.720.769.951,55	0,00	73.033.060.944,24

Medan, 22 Mei 2015

WALIKOTA MEDAN



DRS. H. DZULMI ELDIN S., M.Si



PEMERINTAH KOTA MEDAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015 DAN 2014

(dalam rupiah)

No. Urut	Uraian	Anggaran 2015	Realisasi 2015	%	Realisasi 2014
4	Pendapatan – LRA	5.046.111.839.162,45	4.259.044.490.715,42	84,40	4.042.115.828.231,62
4.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LRA	1.794.704.774.012,45	1.489.723.189.088,60	83,01	1.384.246.114.729,62
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah – LRA	1.267.102.579.446,00	996.029.237.073,94	78,61	962.728.267.172,53
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	205.010.390.000,00	200.156.478.829,00	97,63	171.006.302.216,00
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA	10.312.868.999,00	8.523.731.824,00	82,65	5.705.018.825,00
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah – LRA	312.278.935.567,45	285.013.741.361,66	91,27	244.806.526.516,09
4.2	Pendapatan Transfer – LRA	3.251.407.065.150,00	2.769.321.301.626,82	85,17	2.657.869.713.502,00
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat –LRA	1.429.773.150.613,00	1.355.644.466.363,00	94,82	1.598.113.512.931,00
4.2.1.1	Bagi Hasil Pajak – LRA	194.712.827.000,00	121.401.841.150,00	62,35	146.798.093.693,00
4.2.1.2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam – LRA	2.988.958.613,00	2.171.260.213,00	72,64	2.228.646.238,00
4.2.1.3	Dana Alokasi Umum – LRA	1.232.071.365.000,00	1.232.071.365.000,00	100,00	1.393.504.580.000,00
4.2.1.4	Dana Alokasi Khusus – LRA	0,00	0,00	0,00	55.582.193.000,00
4.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LRA	457.966.812.000,00	457.966.812.000,00	100,00	364.744.140.000,00
4.2.2.1	Dana Penyesuaian – LRA	457.966.812.000,00	457.966.812.000,00	100,00	364.744.140.000,00
4.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LRA	1.355.516.198.137,00	955.710.023.263,82	70,51	695.012.060.571,00
4.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LRA	1.355.516.198.137,00	955.710.023.263,82	70,51	694.490.156.447,00
4.2.3.2	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya – LRA	0,00	0,00	0,00	521.904.124,00
4.2.4	Bantuan Keuangan – LRA	8.150.904.400,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya – LRA	8.150.904.400,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	Pendapatan Hibah – LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja	5.466.429.913.714,00	4.373.738.285.236,94	80,01	3.722.477.161.103,60
5.1	Belanja Operasi	4.109.757.658.553,00	3.456.571.285.912,16	84,11	2.938.075.477.131,97
5.1.1	Belanja Pegawai	2.077.572.370.612,00	1.860.998.685.432,00	89,58	1.664.727.535.625,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.910.774.148.576,00	1.492.863.724.592,05	78,13	1.235.650.531.449,83
5.1.3	Belanja Bunga	3.000.000.000,00	102.194.330,11	3,41	1.424.780.450,14
5.1.4	Belanja Hibah	108.411.139.365,00	102.179.681.558,00	94,25	35.738.893.607,00
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	10.000.000.000,00	427.000.000,00	4,27	533.736.000,00

No. Urut	Uraian	Anggaran 2015	Realisasi 2015	%	Realisasi 2014
5.2	Belanja Modal	1.349.672.255.161,00	916.888.037.907,78	67,93	783.883.177.721,63
5.2.1	Belanja Modal Tanah	201.167.656.150,00	44.383.771.300,00	22,06	43.171.269.654,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	248.693.671.257,00	159.480.875.314,78	64,13	114.963.802.372,63
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	223.359.789.913,00	140.895.132.527,00	63,08	158.665.997.192,00
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	656.751.336.281,00	554.610.652.806,00	84,45	458.113.424.264,00
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	19.699.801.560,00	17.517.605.960,00	88,92	8.968.684.239,00
5.3	Belanja Tak Terduga	7.000.000.000,00	278.961.417,00	3,99	518.506.250,00
5.3.1	Belanja Tak terduga	7.000.000.000,00	278.961.417,00	3,99	518.506.250,00
6	Transfer	1.522.843.400,00	1.229.988.900,00	80,77	1.166.137.982,00
6.1	Transfer Bantuan Keuangan	1.522.843.400,00	1.229.988.900,00	80,77	1.166.137.982,00
6.1.1	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	1.522.843.400,00	1.229.988.900,00	80,77	1.166.137.982,00
	Surplus/(Defisit)	(421.840.917.951,55)	(115.923.783.421,52)	27,48	318.472.529.146,02
7	Pembiayaan				
7.1	Penerimaan Pembiayaan	436.840.917.951,55	370.720.769.951,55	84,86	73.033.060.944,24
7.1.1	Penggunaan SiLPA	370.720.769.951,55	370.720.769.951,55	100,00	73.033.060.944,24
7.1.2	Pinjaman Dalam Negeri	66.120.148.000,00	0,00	0,00	0,00
7.2	Pengeluaran Pembiayaan	15.000.000.000,00	2.221.380.000,00	14,81	20.784.820.138,71
7.2.1	Penyertaan Modal/Investasi	1.679.259.421,00	0,00	0,00	0,00
7.2.2	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	13.320.740.579,00	2.221.380.000,00	16,68	20.784.820.138,71
	Pembiayaan Neto	421.840.917.951,55	368.499.389.951,55	87,36	52.248.240.805,53
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	0,00	252.575.606.530,03	0,00	370.720.769.951,55



MEDAN, 1 AGUSTUS 2016
WALIKOTA MEDAN

DZULMI ELDIN S.



PEMERINTAH KOTA MEDAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

(dalam rupiah)

No. Urut	Uralan	Anggaran 2016	Realisasi 2016	%	Realisasi 2015
4	Pendapatan - LRA	5.490.162.683.364,97	4.308.116.916.024,91	78,47	4.259.044.490.715,42
4.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LRA	1.884.851.580.582,97	1.535.309.574.014,91	81,48	1.489.723.109.088,60
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah -LRA	1.331.127.546.952,00	1.125.638.762.947,32	84,58	998.029.237.073,94
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah -LRA	224.335.400.000,00	115.597.958.126,00	51,53	200.156.478.829,00
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan -LRA	10.312.868.999,00	8.948.679.468,00	86,77	8.523.731.824,00
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah-LRA	319.075.764.611,97	285.124.173.473,59	89,40	285.013.741.361,68
4.2	Pendapatan Transfer - LRA	3.605.032.623.407,00	2.772.807.342.010,00	76,91	2.769.321.301.626,82
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LRA	2.555.242.388.000,00	1.900.853.852.448,00	74,39	1.356.644.486.363,00
4.2.1.1	Bagi Hasil Pajak - LRA	249.664.554.000,00	222.056.416.659,00	89,34	121.401.841.150,00
4.2.1.2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA	2.189.692.000,00	2.216.676.789,00	101,20	2.171.260.213,00
4.2.1.3	Dana Alokasi Umum - LRA	1.611.940.995.000,00	1.611.940.995.000,00	100,00	1.232.071.365.000,00
4.2.1.4	Dana Alokasi Khusus - LRA	691.447.245.000,00	64.640.564.000,00	9,35	0,00
4.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LRA	41.291.769.000,00	336.747.526.000,00	815,53	457.966.812.000,00
4.2.2.1	Dana Penyesuaian - LRA	41.291.769.000,00	336.747.526.000,00	815,53	457.966.812.000,00
4.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	1.005.810.684.007,00	535.205.963.562,00	53,21	955.710.023.263,82
4.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA	1.005.810.684.007,00	535.205.963.562,00	53,21	955.710.023.263,82
4.2.4	Bantuan Keuangan - LRA	2.687.784.400,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LRA	2.687.784.400,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LRA	278.479.395,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	Pendapatan Hibah - LRA	278.479.395,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja	5.735.922.591.995,00	4.523.672.134.655,15	78,87	4.373.738.285.236,94
5.1	Belanja Operasi	4.413.092.921.342,00	3.584.201.617.240,59	81,22	3.456.571.285.912,16
5.1.1	Belanja Pegawai	2.959.163.209.701,00	2.441.393.474.914,00	82,50	1.860.998.685.432,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.394.929.711.641,00	1.101.425.831.408,59	78,98	1.492.663.724.592,05
5.1.3	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	102.194.330,11
5.1.4	Belanja Hibah	54.000.000.000,00	40.988.310.918,00	75,90	102.179.681.558,00
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	5.000.000.000,00	394.000.000,00	7,88	427.000.000,00
5.2	Belanja Modal	1.306.656.265.903,00	936.599.131.961,06	71,68	916.888.037.907,78
5.2.1	Belanja Modal Tanah	127.753.253.750,00	40.930.175.600,00	32,04	44.383.771.300,00

No. Urut	Uraian	Anggaran 2016	Realisasi 2016	%	Realisasi 2015
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	235.452.784.815,00	187.784.016.635,00	79,75	159.480.875.314,78
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	165.980.705.070,00	95.818.457.515,00	58,33	140.895.132.527,00
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	725.993.893.093,00	596.401.311.764,06	78,02	554.610.652.806,00
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	51.465.629.175,00	44.665.170.447,00	86,79	17.517.605.960,00
5.3	Belanja Tak Terduga	16.173.404.750,00	2.871.385.453,50	17,75	278.961.417,00
5.3.1	Belanja Tak terduga	16.173.404.750,00	2.871.385.453,50	17,75	278.961.417,00
6	Transfer	1.815.697.900,00	1.559.196.340,00	85,87	1.229.988.900,00
6.1	Transfer Bantuan Keuangan	1.815.697.900,00	1.559.196.340,00	85,87	1.229.988.900,00
6.1.1	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	1.229.988.900,00
6.1.2	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	1.815.697.900,00	1.559.196.340,00	85,87	0,00
	Surplus/(Defisit)	(247.575.606.530,03)	(217.114.414.970,44)	87,70	(116.923.783.421,52)
7	Pembiayaan				
7.1	Penerimaan Pembiayaan	252.575.606.530,03	252.575.606.530,03	100,00	370.720.789.951,55
7.1.1	Penggunaan SILPA	252.575.606.530,03	252.575.606.530,03	100,00	370.720.789.951,55
7.2	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1	Penyertaan Modal/Investasi	1.679.259.421,00	0,00	0,00	0,00
7.2.2	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	3.320.740.579,00	0,00	0,00	2.221.380.000,00
	Pembiayaan Neto	247.575.606.530,03	252.575.606.530,03	102,02	368.499.389.951,55
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	0,00	35.461.191.559,79	0,00	252.575.606.530,03


 JUNI 2017
 WALIKOTA MEDAN,
 Drs. H. DZULMI ELDIN S., M.Si.



PEMERINTAH KOTA MEDAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

(dalam rupiah)

Uralan	Reff CaLK	Anggaran 2017	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
Pendapatan – LRA	5.1.1	5.523.623.117.419,81	4.409.065.482.200,50	79,82	4.308.116.916.024,91
Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LRA	5.1.1.1	2.031.995.548.717,81	1.739.766.922.633,50	85,62	1.535.309.574.014,91
Pendapatan Pajak Daerah –LRA	5.1.1.1.1	1.387.127.546.952,00	1.370.149.681.442,32	98,78	1.125.638.762.947,32
Pendapatan Retribusi Daerah –LRA	5.1.1.1.2	255.573.650.000,00	113.452.533.261,00	44,39	115.597.958.126,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA	5.1.1.1.3	12.181.227.000,00	11.095.561.295,00	91,09	8.948.679.468,00
Lain-lain PAD yang Sah-LRA	5.1.1.1.4	377.113.124.765,81	245.059.146.635,18	64,98	285.124.173.473,59
Pendapatan Transfer – LRA	5.1.1.2	3.491.627.568.702,00	2.669.308.559.567,00	76,45	2.772.807.342.010,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat –LRA	5.1.1.2.1	2.236.515.051.000,00	2.122.769.416.793,00	94,91	1.900.853.852.448,00
Bagi Hasil Pajak – LRA	5.1.1.2.1.1	257.310.464.000,00	198.592.781.675,00	77,18	222.056.416.659,00
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam – LRA	5.1.1.2.1.2	2.081.721.000,00	728.354.995,00	34,99	2.215.876.789,00
Dana Alokasi Umum – LRA	5.1.1.2.1.3	1.611.940.995.000,00	1.583.624.375.000,00	98,24	1.611.940.995.000,00
Dana Alokasi Khusus – LRA	5.1.1.2.1.4	365.181.871.000,00	339.823.905.123,00	93,06	64.640.564.000,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LRA	5.1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	336.747.526.000,00
Dana Penyesuaian – LRA		0,00	0,00	0,00	336.747.526.000,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LRA	5.1.1.2.3	1.155.077.217.702,00	546.539.142.774,00	47,32	535.205.963.562,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LRA	5.1.1.2.3.1	1.154.798.738.307,00	546.260.663.379,00	47,30	535.205.963.562,00
Pendapatan Bagi Hasil Retribusi – LRA	5.1.1.2.3.2	278.479.395,00	278.479.395,00	100,00	0,00
Bantuan Keuangan – LRA	5.1.1.2.4	100.035.300.000,00	0,00	0,00	0,00
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya – LRA		100.035.300.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja	5.1.2	5.546.733.964.019,40	4.394.045.824.264,53	79,22	4.523.672.134.655,15
Belanja Operasi	5.1.2.1	4.119.300.403.261,40	3.396.569.832.362,53	82,46	3.584.201.617.240,59
Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	2.498.899.756.155,40	2.207.347.032.699,00	88,33	2.441.393.474.914,00
Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2	1.552.599.853.106,00	1.133.180.467.613,53	72,99	1.101.425.831.408,59
Belanja Hibah	5.1.2.1.3	60.000.000.000,00	55.317.675.150,00	92,20	40.988.310.918,00
Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.4	7.800.784.000,00	724.656.900,00	9,29	394.000.000,00
Belanja Modal	5.1.2.2	1.411.306.657.578,00	997.475.991.902,00	70,68	936.599.131.961,06
Belanja Modal Tanah	5.1.2.2.1	123.861.070.001,00	66.525.256.216,00	53,71	40.930.175.600,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	202.867.433.668,00	133.047.008.057,00	65,58	187.784.016.635,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3	147.054.051.225,00	58.403.395.809,00	39,72	96.818.457.515,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.1.2.2.4	925.144.505.938,00	733.321.157.013,00	79,27	566.401.311.764,06
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	12.379.596.746,00	6.179.174.807,00	49,91	44.665.170.447,00

Uraian	Reff CaLK	Anggaran 2017	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
Belanja Tak Terduga	5.1.2.3	16.126.903.180,00	0,00	0,00	2.871.385.453,50
Belanja Tak terduga		16.126.903.180,00	0,00	0,00	2.871.385.453,50
Transfer	5.1.3	7.350.344.960,00	1.779.344.960,00	24,21	1.559.196.340,00
Transfer Bantuan Keuangan		7.350.344.960,00	1.779.344.960,00	24,21	1.559.196.340,00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya		7.350.344.960,00	1.779.344.960,00	24,21	1.559.196.340,00
Surplus/(Defisit)	5.1.4	(30.461.191.559,59)	13.240.312.975,97	(43,47)	(217.114.414.970,24)
Pembiayaan	5.1.5				
Penerimaan Pembiayaan	5.1.5.1	35.461.191.559,59	35.461.191.559,79	100,00	252.575.606.530,03
Penggunaan SILPA	5.1.5.1.1	35.461.191.559,59	35.461.191.559,79	100,00	252.575.606.530,03
Pengeluaran Pembiayaan	5.1.5.2	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00	0,00
Penyertaan Modal/Investasi	5.1.5.2.1	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00	0,00
Pembiayaan Neto		30.461.191.559,59	30.461.191.559,79	100,00	252.575.606.530,03
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)		0,00	43.701.504.535,76	0,00	35.461.191.559,79

h

WALI-KOTA MEDAN,



[Signature]
DZULMI ELDIN S.



PEMERINTAH KOTA MEDAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(dalam rupiah)

Uraian	Ref.	Anggaran 2018	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
Pendapatan - LRA	5.1.1	5.239.408.011.116,00	4.253.618.758.532,53	81,19	4.409.065.482.200,50
Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LRA	5.1.1.1	2.112.663.059.116,00	1.636.204.514.683,53	77,45	1.739.756.922.633,50
Pendapatan Pajak Daerah – LRA	5.1.1.1.1	1.511.000.000.000,00	1.312.070.185.618,00	86,83	1.370.149.681.442,32
Pendapatan Retribusi Daerah – LRA	5.1.1.1.2	250.841.500.000,00	85.204.885.174,00	33,97	113.452.533.261,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan –LRA	5.1.1.1.3	12.300.000.000,00	11.901.953.037,00	96,76	11.095.561.295,00
Lain-lain PAD yang Sah-LRA	5.1.1.1.4	338.521.559.116,00	227.027.490.854,53	67,06	245.059.146.635,18
Pendapatan Transfer – LRA	5.1.1.2	3.126.744.952.000,00	2.617.414.243.849,00	83,71	2.669.308.559.567,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat –LRA	5.1.1.2.1	2.246.744.952.000,00	2.157.180.424.946,00	96,01	2.122.769.416.793,00
Bagi Hasil Pajak – LRA	5.1.1.2.1.1	271.009.540.000,00	212.631.219.115,00	78,46	198.592.781.675,00
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam – LRA	5.1.1.2.1.2	3.811.823.000,00	4.136.026.631,00	108,51	728.354.995,00
Dana Alokasi Umum – LRA	5.1.1.2.1.3	1.583.624.375.000,00	1.583.624.375.000,00	100,00	1.583.624.375.000,00
Dana Alokasi Khusus – LRA	5.1.1.2.1.4	388.299.214.000,00	356.788.804.200,00	91,89	339.823.905.123,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LRA		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Penyesuaian – LRA		0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LRA	5.1.1.2.2	780.000.000.000,00	390.135.098.003,00	50,02	546.539.142.774,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LRA	5.1.1.2.2.1	780.000.000.000,00	390.135.098.003,00	50,02	546.260.663.379,00
Pendapatan Bagi Hasil Retribusi – LRA	5.1.1.2.2.1	0,00	0,00	0,00	278.479.395,00
Bantuan Keuangan – LRA	5.1.1.2.3	100.000.000.000,00	70.098.720.900,00	70,10	0,00
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya – LRA		100.000.000.000,00	70.098.720.900,00	70,10	0,00
Belanja	5.1.2	5.449.562.922.528,00	4.213.480.509.726,24	77,32	4.394.045.824.264,53
Belanja Operasi	5.1.2.1	4.274.124.864.704,00	3.455.113.095.305,68	80,84	3.396.569.832.362,53
Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	1.855.876.120.770,00	1.694.592.398.172,00	91,31	2.207.347.032.699,00
Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2	2.353.248.743.934,00	1.717.381.657.249,68	72,98	1.133.180.467.613,53
Belanja Hibah	5.1.2.1.3	60.000.000.000,00	43.007.039.884,00	71,68	55.317.675.150,00
Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.4	5.000.000.000,00	132.000.000,00	2,64	724.656.900,00
Belanja Modal	5.1.2.2	1.168.438.057.824,00	753.996.886.210,07	64,53	997.475.991.902,00

Uraian	Ref.	Anggaran 2018	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
Belanja Modal Tanah	5.1.2.2.1	83.540.345.416,00	53.238.817.927,00	63,73	66.525.256.216,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	248.265.156.814,00	173.633.532.132,38	69,94	133.047.008.057,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3	257.627.189.304,00	106.842.921.753,46	41,47	58.403.395.809,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.1.2.2.4	565.547.093.298,00	411.121.088.418,23	72,69	733.321.157.013,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	13.458.272.992,00	9.160.525.979,00	68,07	6.179.174.807,00
Belanja Tak Terduga	5.1.2.3	7.000.000.000,00	4.370.528.210,49	62,44	0,00
Belanja Tak terduga	5.1.2.3.1	7.000.000.000,00	4.370.528.210,49	62,44	0,00
Transfer	5.1.2.4	1.522.843.400,00	1.522.843.400,00	100,00	1.779.344.960,00
Transfer Bantuan Keuangan	5.1.2.4	1.522.843.400,00	1.522.843.400,00	100,00	1.779.344.960,00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	5.1.2.4.1	1.522.843.400,00	1.522.843.400,00	100,00	1.779.344.960,00
Surplus/(Defisit)	5.1.2.5	(211.677.754.812,00)	38.615.405.406,29	(18,24)	13.240.312.975,97
Pembiayaan	5.1.2.6				
Penerimaan Pembiayaan	5.1.2.6.1	43.701.504.535,76	43.701.504.535,76	100,00	35.461.191.559,79
Penggunaan SiLPA		43.701.504.535,76	43.701.504.535,76	100,00	35.461.191.559,79
Pengeluaran Pembiayaan	5.1.2.6.2	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	100,00	5.000.000.000,00
Penyertaan Modal/Investasi		15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	100,00	5.000.000.000,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri		0,00	0,00	0,00	0,00
Pembiayaan Neto		28.701.504.535,76	28.701.504.535,76	100,00	30.461.191.559,79
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)		(182.976.250.276,24)	67.316.909.942,05	(36,79)	43.701.504.535,76





Wawancara dengan Bapak Syahrial Rangkuti (Kepala Bidang Anggaran)



Wawancara dengan Ibu Nina Anggina Lubis (Anggota/Staf Bidang Anggaran)



Wawancara dengan Ibu Erlina Riz (Anggota/Staf Sub Bidang Pendapatan)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Debby Tamara Enre
NIM : 0502162082
Tempat/Tgl.Lahir : P. Siantar, 01 Januari 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Bajak I Perumahan Suka Cipta Residence

Riwayat Pendidikan

1. Tahun 2004-2008 : SD Taman Asuhan Pematang Siantar
2. Tahun 2008-2010 : SD Abdi Sukma Medan
3. Tahun 2010-2013 : SMP Harapan Mandiri Medan
4. Tahun 2013-2016 : SMA Global Prima Medan
5. Tahun 2016-2020 : S1 Akuntansi Syariah UINSU Medan

Riwayat Organisasi

1. Anggota Osis SMP Harapan Mandiri Medan
2. Anggota Osis SMA Global Prima Medan
3. Anggota/Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Akuntansi Syariah
Periode 2018/2019

Pengalaman Praktek Kerja (Magang)

1. BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara